

# sinergi

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH



## Intervensi Infrastruktur PUPR Dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)  
KEMENTERIAN PUPR  
[bpiw.pu.go.id](http://bpiw.pu.go.id)



Edisi 57 | Maret - April 2022

## Tim Penyusun

### Pelindung:

Rachman Arief Dienaputra

### Penanggung Jawab:

Iwan Nurwanto

### Penasihat Redaksi:

Benny Hermawan

Hari Suko Setiono

Kuswardono

Manggas Rudy Siahaan

### Pemimpin Redaksi:

Hari Suharto Diyaksa

### Redaktur Pelaksana:

Tiara Titi Kartika

### Penyunting/Editor :

Bernadi Haryawan

Hasna Widiastuti

Entatarina Simanjuntak

Doedoeng Zenal Arifin

Shovich

Dita S.N.A Diliani

Aji Noor

Tommy Aramanda Hutasuht

Mutri Batul Aini

Azim Al Haqy Hakim

Nabilatul Arifah

Alfin Nurus Subkhi

Nicholas

### Desain Grafis:

Rasyid Pranawa

### Fotografer:

Daris Anugrah

Hendra Djamal

### Sekretariat:

Untung Priyono

### Diterbitkan oleh:

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)  
Kementerian PUPR



# SIGAP MEMBANGUN NEGERI



# Salam Sinergi

## Pembaca yang terhormat.

Buletin Sinergi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menampilkan berbagai informasi seputar perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR.

Pada edisi edisi 57 Maret-April ini, mengangkat tema Kemiskinan Ekstrem yang sedang ditangani pemerintah. Kementerian PUPR termasuk BPIW turut andil mengatasi kemiskinan ekstrem dengan melakukan kajian kemiskinan ekstrem melalui survei ke sejumlah daerah. Rubrik Topik Utama akan mengulas tema itu. Rubrik Wawancara yang menghadirkan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Andi Megantara juga membahas kemiskinan ekstrem, salah satunya mengenai pelaksanaan dan koordinasi yang dilakukan Kemenko PMK dalam menangani kemiskinan ekstrem di tanah air dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Pada rubrik Perspektif menampilkan tiga narasumber dari Kementerian PUPR, yang mengupas kemiskinan ekstrem dari sudut pandangnya masing-masing. Tiga narasumber tersebut adalah Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan, Ir. Edward Abdurrahman, M.Sc.

Selain itu ada Perspektif dari Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Pandu Gunadi Atmosukarto, S.T., MUM., dan Subkoordinator Wilayah Jambi dan Bengkulu Bidang I B, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I BPIW Indra Maulana, S.T., M.T.

Rubrik Warta BPIW mengupas mengenai pengembangan Infrastruktur Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi. Buletin Sinergi juga membahas kegiatan BPIW dalam rubrik Ulasan Berita. Pengembangan infrastruktur mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Taman Nasional Danau Sentarum dibahas di rubrik Info Pengembangan Wilayah. Sedangkan rubrik BPIW Muda mengulas mengenai Mitigasi Risiko dalam Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Wilayah.

Selain itu juga ditampilkan rubrik Kerabat Perencana. Rubrik ini merupakan ruang bagi unit organisasi diluar BPIW untuk menampilkan Informasi terkait infrastruktur PUPR yang akan dan sedang dilakukan serta terkait konsep perencanaan dan pemrograman. Resensi buku yang berjudul "*Building the Inclusive City, Theory and Practice for Confronting Urban Segregation*" dibahas pada rubrik Review.

Rubrik-rubrik ringan juga mewarnai buletin Sinergi BPIW seperti Serba-Serbi, Kuis, Tips, Bidik Lensa, Plesiran, dan Pesan Pembaca.

Kami berharap, rubrik-rubrik yang kami tampilkan dapat meningkatkan wawasan pembaca, terutama seputar perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dan pengembangan wilayah.

## Pemimpin Redaksi



# daftar isi

## 6 Topik Utama

Intervensi Infrastruktur PUPR Dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia



### 10 Wawancara

Andi Megantara  
Tahun 2024 Miskin Ekstrem Ditarget Terhapus, Penanganan Terintegrasi dengan Kolaborasi Intervensi Kebijakan



### 13 Perspektif

Ir. Edward Abdurrahman, M.Sc.  
Kolaborasi Dalam Penyediaan Hunian Layak untuk Rumah Tangga Miskin Ekstrem

### 22 Warta BPIW

Kementerian PUPR Dukung Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi



TRANSMIGRASI MEMBANGUN KAWA  
MENDUKUNG TERCAPAINYA SDGs  
9 - 11 MARET 2022 | HOTEL VASA, SUR



# SINERGI

Edisi Maret - April 2022



29

## Sorot

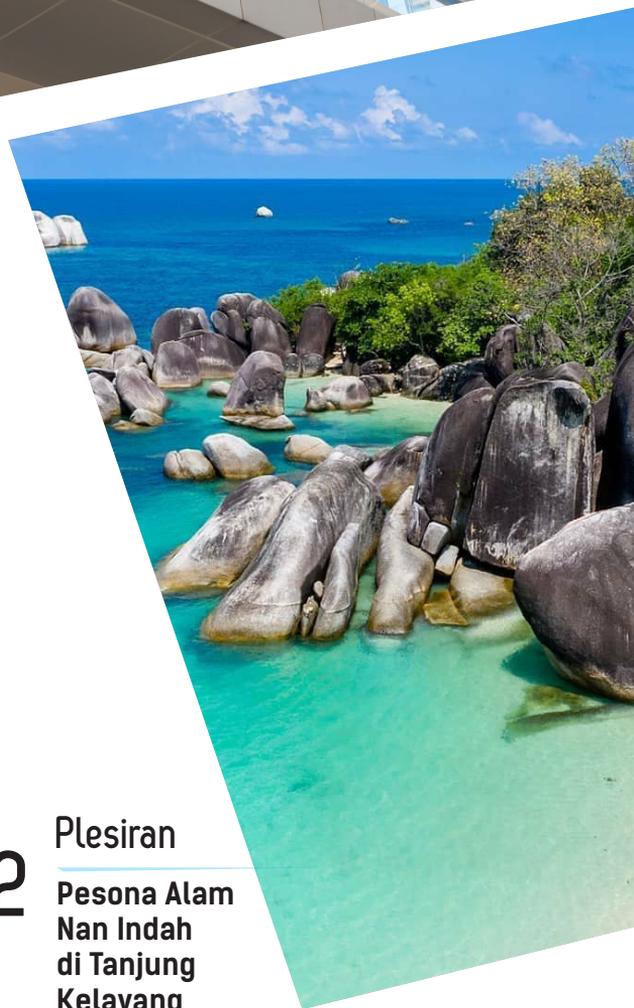
Ada Harapan Besar Kemiskinan Ekstrem 0 Persen di 2024 Dapat Terealisasi



52

## Plesiran

Pesona Alam Nan Indah di Tanjung Kelayang



42

## Kerabat Perencana

Perencanaan Kebun Raya Kolaka

Hastuty, S.T., M.Eng  
dan  
Sri Asnita Nurdin, S.T., M.T.

# Intervensi Infrastruktur PUPR Dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

Pemerintah saat ini sedang memfokuskan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE). Ditargetkan 2024 mendatang, tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kementerian PUPR pun melakukan intervensi infrastruktur untuk mencapai target tersebut.

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dengan penghasilan setara dengan USD 1,9 per hari (*Purchasing Power Parity* atau paritas daya beli). Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI 12 April lalu. Menteri Basuki menjelaskan hingga akhir 2021 tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia mencapai 4 persen.

Untuk mengatasi hal itu, kebijakan pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo adalah mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0 persen pada tahun 2024, melalui kerjasama lintas kementerian dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Menurutnya, data yang sudah ada akan dicek atau dicocokkan langsung ke lapangan. "Saat ini sedang dilakukan pendalaman lokasi, sasaran, dan jenis penanganan yang direncanakan pelaksanaan fisik mulai Juni 2022," kata Basuki. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa program untuk wilayah yang ditetapkan masuk kategori wilayah ekstrem akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Rapat Pleno Tingkat Menteri Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) beberapa waktu lalu telah membuat rencana kerja percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pada Juli-Desember 2021 yang merupakan Implemmentasi Tahap I Juli-Desember 2021 ditargetkan penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan di 35 Kabupaten/Kota Prioritas (tujuh provinsi) yakni Jawa

“ Penanganan kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0 persen pada tahun 2024, melalui kerjasama lintas kementerian dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). ”

Kawasan Kumuh di Perkotaan  
Sumber : [ekonomi.bisnis.com](http://ekonomi.bisnis.com)

Penanganan kemiskinan ekstrem membutuhkan konvergensi kebijakan berbagai instansi, supaya dapat tepat sasaran dan efisien

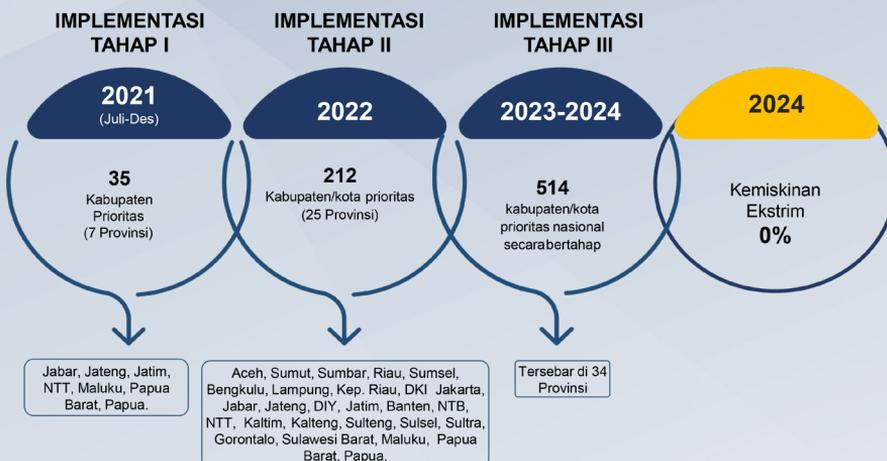
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat, Papua.

Pada Implementasi Tahap II 2022 terdapat 212 kabupaten/kota di 25 provinsi prioritas. Ke-25 yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Sedangkan Implementasi Tahap III akan dilakukan di 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi prioritas nasional secara bertahap pada 2023-2024. Pada masing-masing kab/kota dipilih lima kecamatan pada dua desa, dan dua RT/RW/ Dusun/unit terkecil yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terbanyak sebagai lokus prioritas.

Pada 212 kab/kota prioritas itu, dukungan Kementerian PUPR dilaksanakan melalui perencanaan terpadu oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).

**PERENCANA KERJA  
PERCEPATAN PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM**



Sumber : PUPR 2022

Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra mengatakan penanganan kemiskinan ekstrem membutuhkan konvergensi kebijakan berbagai instansi, supaya dapat tepat sasaran dan efisien. Ia menegaskan, agar konvergensi dapat dilaksanakan, perlu dimulai dengan penentuan lokus-lokus permukiman.

Dengan begitu, peta kluster perumahan serta perkiraan kebutuhan infrastruktur sangat dibutuhkan sebagai dasar penanganan kemiskinan ekstrem melalui infrastruktur terintegrasi. "Sesuai arahan Bapak Menteri PUPR, Kementerian PUPR akan mengintegrasikan program perumahan dan permukiman dalam skala lingkungan atau kawasan," terang Rachman.

Dukungan program infrastruktur untuk penanganan kemiskinan ekstrem Tahun 2022 melalui dua program yakni pertama program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang mewujudkan pembangunan infrastruktur yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Pada program ini partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Kegiatan ini meliputi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Program dukungan infratruktur yang kedua yakni Program Penyediaan Perumahan berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swasta (BSPS) yang merupakan bantuan pemerintah bagi MBR untuk mendorong dan

meningkatkan kesediaan dan dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.

Penerima BSPS adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan yakni Warga Negara



Kepala BPIW saat kunjungan ke kawasan kemiskinan ekstrem di Kota Surakarta, Jawa Tengah.  
Sumber : Kompu BPIW

“ Dukungan program infrastruktur untuk penanganan kemiskinan ekstrem Tahun 2022 melalui dua program yakni program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan Program Penyediaan Perumahan berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)



Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Peryaratan lainnya adalah belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan, berpenghasilan maksimal sebesar Upah Minimum Provinsi, dan bersedia bereswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan pernyataan tanggung renteng.

### **BPIW Lakukan Survei Lapangan**

BPIW Kementerian PUPR menurunkan beberapa tim kolaborasi, untuk melakukan survei verifikasi dan validasi dalam penerapan program terintegrasi pada penanganan kemiskinan ekstrem dan *stunting* di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Palembang, pada 15 Maret-18 Maret 2022 lalu. Survei dilakukan di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring dan survei difokuskan pada di RT 11. Survei juga

dilakukan di 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dan survei difokuskan di RW 009.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono yang memimpin tim survei BPIW menjelaskan dirinya beserta tim ditugaskan menangani dari sisi kebutuhan intervensi infrastruktur PUPR yakni program Ditjen Cipta Karya dan Perumahan.

“Kita ditugaskan untuk mengintegrasikan program pembangunan infrastruktur Ditjen Cipta Karya dan Perumahan supaya tepat sasaran untuk menysasar lokasi-lokasi miskin ekstrem dan *stunting*,” ujarnya. Ia berharap dengan intervensi infrastruktur PUPR, kantong-kantong kemiskinan berkurang.

Sebelum pelaksanaan survei, pada Senin, 14 Maret, dilakukan rapat persiapan survei di kantor Bappeda Litbang Kota Palembang. Rapat tersebut membahas beberapa hal seperti detail kondisi lokasi yang disurvei dan *outcome* yang akan dicapai dari survei itu.

Data dari BKKBN itu kemudian divalidasi dengan kondisi lapangan. Setelah dilakukan survei, permasalahan utama yang ditemukan adalah bahwa sebagian besar Kepala Keluarga (KK) masih belum memiliki legalitas yang jelas, karena berada di tanah milik Pemerintah Provinsi Sumsel maupun milik orang lain.

Namun ada rumah yang sudah bersertifikat tanah hak milik sendiri, dan diketahui juga bahwa terdapat

rumah yang belum memiliki sanitasi yang baik dan kondisi rumah yang tidak memadai. Dari data yang ada tersebut menurut Hari akan ditentukan lagi, apakah program Cipta Karya dan Perumahan akan dilakukan di kawasan tersebut atau perlu adanya alternatif kawasan lain yang memungkinkan dilakukan intervensi Kementerian PUPR sesuai kriteria yang ada. "Data yang ada kita verifikasi dan intervensi infrastruktur tersebut akan direalisasikan tahun ini," ucap Hari Suko.

Survei tersebut juga diikuti tim dari BKKBN pusat dan Kota Palembang, Pemerintah Kota Palembang terutama Bappeda Litbang, Lurah, Ketua RW dan RT. Kemudian dari Kementerian PUPR turut ikut serta dalam survei ini adalah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera V dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan.

Hasil survei merupakan identifikasi temuan lapangan, seperti yang dilakukan di Kelurahan Kecamatan Kertapati, Kelurahan Kemas Rindo, terdapat beberapa rumah yang masih belum memiliki akses sanitasi dan air minum yang belum memadai. Sebagian besar legalitas kepemilikan tanah masyarakat juga diketahui masih belum didapatkan, karena masyarakat belum mampu untuk melunasi kredit untuk mengambil sertifikat tanahnya. Survei juga dilakukan di Kecamatan Sirah Pulau Padang dan Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Lokasi lain yang di survei yakni Nusa Tenggara Timur (Timor Tengah Selatan), Sulawesi Selatan (Bone dan Jenoponto), Maluku (Maluku Tengah dan Maluku Tenggara), serta Papua Barat (Manokwari Selatan dan Bintuni). Direncanakan pada bulan Mei akan kembali dilakukan survei. Data dari hasil survei ini akan sangat bermanfaat terutama untuk merealisasikan perbaikan rumah, sanitasi, dan air minum. **(Tim Redaksi)**



*Kondisi rumah di Kelurahan Kemas Rindo Palembang yang di survei tim dari BPIW  
Sumber : Kompu BPIW*



*Foto rapat koordinasi di Bappeda Palembang 14 Maret 2022 sebelum pelaksanaan survei  
Sumber : Kompu BPIW*



*Seorang ibu dan anaknya duduk di serambi rumahnya di tengah rawa di Kel Kemas Rindo Palembang  
Sumber : Kompu BPIW*

“ BPIW Kementerian PUPR menurunkan beberapa tim kolaborasi, untuk melakukan survei verifikasi dan validasi dalam penerapan program terintegrasi pada penanganan kemiskinan ekstrem dan *stunting* di beberapa daerah di Indonesia “



## Tahun 2024 Miskin Ekstrem Ditarget Terhapus, Penanganan Terintegrasi dengan Kolaborasi Intervensi Kebijakan

Andi Megantara, Ph.D.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial  
Kemenko PMK

Pemerintah telah menargetkan untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2022 ini, dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem dilakukan pada 212 kabupaten/kota di 25 provinsi. Seperti apa langkah strategi yang dilakukan pemerintah? Berikut wawancara Buletin Sinergi dengan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Andi Megantara, Ph.D.

### ***Apa sebenarnya yang menjadi justifikasi penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting?***

Salah satu tujuan dalam *Sustainable Development Goals* adalah "No Poverty" dengan cita-cita menghapus semua bentuk kemiskinan dimana saja pada tahun 2030. Kemiskinan lebih dari sekadar kurangnya pendapatan dan sumber daya untuk memastikan penghidupan yang berkelanjutan. Manifestasinya meliputi kelaparan dan kekurangan gizi, akses terbatas ke pendidikan dan layanan dasar lainnya. Untuk itu Indonesia berusaha mewujudkan cita-cita tersebut dan mencoba untuk mencapainya sebelum tahun 2030.

Sesuai arahan presiden, Kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) pada 2024 harus mencapai 0 persen dengan Strategi pengentasan kemiskinan yang harus terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran. Ditengah pandemi, upaya pemerintah untuk penanganan kemiskinan ekstrem harus tetap berjalan sesuai dengan target 0 persen di tahun 2024. Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi kebijakan, dengan memastikan intervensi di sektor pendidikan, kesehatan, dan air bersih dan dengan mempertajam basis data untuk ketepatan target sasaran penerima manfaat.

### ***Pandangan Bapak terkait Pelaksanaan dan Koordinasi yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam Menangani Kemiskinan Ekstrem di Tanah Air dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah?***

Dalam pelaksanaan penghapusan Kemiskinan Ekstrem diperlukan konvergensi dari berbagai program yang ada di Kementerian/Lembaga (K/L) termasuk dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Kemenko PMK bertugas untuk memastikan bahwa konvergensi program dan ketepatan sasaran dapat dilaksanakan dengan optimal, melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program-program tersebut dengan baik terutama dalam fokus pengurangan beban pengeluaran dan pengurangan kantong kemiskinan yang menjadi tanggung jawab Kemenko PMK.

### ***Apakah dapat disampaikan terkait rencana dan strategi terbaru terkait penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, mengingat target pemerintah pada tahun 2024 untuk kemiskinan ekstrem dan stunting di Indonesia harus teratasi semaksimal mungkin?***

Terdapat tiga strategi penghapusan kemiskinan yaitu strategi pengurangan beban melalui program



Andi Megantara saat melakukan koordinasi antara lembaga dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Kota Surakarta, Jawa Tengah.  
Sumber : Kompu BPIW

bantuan sosial dan jaminan sosial, strategi peningkatan pendapatan melalui program pemberdayaan, padat karya, dll dan strategi pengurangan kantong kemiskinan melalui perbaikan rumah, perbaikan lingkungan maupun kawasan. Ketiga strategi tersebut akan dikongkregensikan dan dalam pelaksanaannya dilakukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, maupun masyarakat.

Saat ini upaya konvergensi yang dilakukan adalah dengan menjadikan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi *mainstream* untuk ditangani oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh K/L, pemerintah daerah, BUMN, Swasta dan masyarakat yang dipusatkan pada wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem (tahun 2022 terdapat 212 kab/kota prioritas dan dilanjut 2023-2024 menjadi seluruh kab/kota). Titik lokus prioritas akan ditangani dengan program yang berasal dari ketiga strategi tersebut dengan menggunakan satu data sasaran.

Adapun data sasaran yang digunakan adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari Pendataan Keluarga (PK)-BKKBN 2021. PK BKKBN merupakan data set "*by name-by address*" yang memiliki informasi karakteristik sosial-ekonomi sehingga dapat dilakukan perangkingan tingkat kesejahteraan keluarga. PK BKKBN yang telah dirangking tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai Data Pensasaran

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) dan akan diberikan kepada pemerintah daerah dan K/L untuk dijadikan sebagai dasar penetapan sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem.

### **Langkah-langkah apa yang diambil Kemenko PMK sebagai "leader" terkait penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting?**

Mempercepat validasi data dan mempertajam basis data untuk ketepatan target dan upaya percepatan mengenai identitas penduduk sangat miskin sebagai dasar pelaksanaan instrument kebijakan (*by name by address*). Merumuskan strategi penanganan pengentasan kemiskinan ekstrim yang terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran.

Memastikan dukungan kebijakan fiskal tahun 2022 - 2024 dengan fokus untuk melanjutkan komitmen menurunkan kemiskinan, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem, dan mengurangi ketimpangan sosial.

Mengoptimalkan dan mengintegrasikan dengan sumber dana Non APBN sebagai pelengkap dari keterbatasan dan fleksibilitas sumber dana dari APBN. Kemudian, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi kebijakan.



Salah satu rumah warga di Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat yang didata akan mendapat bantuan penanganan miskin ekstrem dari pemerintah.

Sumber : Kompu BPIW

### **Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting dan solusi dalam menghadapi tantangan tersebut?**

Hambatan yang saat ini dihadapi dalam pengurangan beban pengeluaran adalah adanya *exclusion error* yaitu keluarga miskin ekstrem tidak mendapat bantuan sosial ataupun jaminan sosial karena tidak tercatat dalam DTKS maupun belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Dalam hal ini, telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk dapat mengcover dengan jaring pengaman sosial daerah bersumber APBD terlebih dahulu parallel dilakukan perbaikan administrasi kependudukan keluarga miskin ekstrem.

Sementara itu, terkait dengan penghapusan kantong kemiskinan dan pencegahan *stunting* khususnya pada Penduduk miskin di perkotaan, pada umumnya merupakan kaum pendatang/urban, bekerja di sektor informal, mendiami tempat tinggal di atas tanah yang bukan hak milik (Milik Negara, BUMN, dan Swasta). Oleh karena itu, saat ini dilakukan upaya untuk mendorong Pemerintah daerah membantu membuat legalitas resmi terkait lahan-lahan yang ditempati dan tentunya dengan melonggarkan prasyarat lahan untuk program RTLH khusus keluarga miskin ekstrem.

Hambatan lainnya adalah terkait pendanaan swadaya masyarakat untuk pembangunan rumah yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh keluarga miskin ekstrem. Solusi yang diberikan adalah pemerintah menambah nilai bantuan bagi keluarga miskin ekstrem dan pemerintah juga membuka ruang dengan melibatkan pihak BUMN dan swasta melalui skema CSR untuk ikut andil dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.

### **Apa upaya Kemenko PMK dalam percepatan integrasi satu data dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting?**

Dalam upaya percepatan integrasi satu data Kemenko PMK telah berkoordinasi dengan BKKBN-BPS-Set TNP2K-Dukcapil untuk melakukan pepadanan data *Pendataan Keluarga (PK)-BKKBN 2021 data set by name-by address* yang memiliki informasi karakteristik sosial-ekonomi dengan berbagai data lain yang dimiliki pemerintah seperti dengan Data Susenas BPS dan NIK untuk menjamin ketepatan data yang lebih baik. Selain itu, merekomendasikan kepada PUPERA dalam penanganan kantong kemiskinan juga menggunakan data PK BKKBN.

### **Seberapa jauh respon Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting?**

Respon K/L dan Pemda dalam penghapusan Kemiskinan ekstrem sangat baik, karena memang sudah menjadi instruksi Presiden dan program nasional. Bahkan beberapa daerah sudah mulai bergerak untuk menyusun mekanisme penghapusan Kemiskinan ekstrem, mulai dari memastikan data usulan daerah terkait kemiskinan ekstrem sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dalam pengurangan kantong kemiskinan misalnya, PUPR telah merespon dengan membuat program konvergensi penanganan kantong kemiskinan dan stunting yaitu dengan mengintervensi kantong miskin ekstrem dan *stunting* dengan program perbaikan rumah, perbaikan sanitasi lingkungan maupun kawasan.

### **Harapan kedepan terkait intervensi infrastruktur PUPR dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting?**

Harapan dari pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah Kementerian PUPR mempercepat proses validasi data terkait wilayah penghapusan kantong kemiskinan sehingga program konvergensi di wilayah kantong kemiskinan dan *stunting* dapat segera diwujudkan diseluruh penjuru Indonesia. Melakukan relaksasi aturan pemberian bantuan yang mensyaratkan hak milik bagi masyarakat miskin ekstrem dan stunting dan juga memberikan tambahan besaran alokasi per satuan bantuan bagi masyarakat miskin ekstrem dan *stunting*. (Daris)

# Kolaborasi Dalam Penyediaan Hunian Layak untuk Rumah Tangga Miskin Ekstrem



Oleh

**Ir. Edward Abdurrahman, M.Sc.**

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan

Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR

Merujuk data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia pada periode tahun 2017 - 2021 berkisar 4,0 - 5,7 persen, dengan kecenderungan menurun pada 2017 – 2019 dan meningkat kembali pada tahun 2020 – 2021

Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) adalah salah satu target global sebagaimana dimuat dalam dokumen *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan pertama SDGs menetapkan target pengentasan kemiskinan ekstrem secara global pada tahun 2030. Namun demikian, Presiden Joko Widodo menetapkan target penanganan kemiskinan ekstrem yang lebih ambisius di Indonesia. Dalam Rapat Terbatas Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Kantor Kepresidenan pada tanggal 4 Maret 2022, Joko Widodo menetapkan target 0 persen rumah tangga miskin ekstrem di Indonesia pada tahun 2024.

Kelompok rumah tangga yang tergolong miskin ekstrem ini membutuhkan dukungan fisik dan non-fisik untuk memenuhi kebutuhan dasar dan untuk mengembangkan kapasitas ekonomi agar dapat hidup layak.

Merujuk data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia pada periode tahun 2017 - 2021 berkisar 4,0 - 5,7 persen, dengan kecenderungan menurun pada 2017 – 2019 dan meningkat kembali pada tahun 2020 – 2021 seiring dengan memburuknya kondisi ekonomi akibat pandemi Covid 19. Secara rinci, persentase penduduk miskin ekstrem di Indonesia pada tahun 2017 – 2021 adalah:



Sumber: diolah dari data survey Sosial Ekonomi Nasional, BPS.

Dengan membandingkan data persentase penduduk Indonesia yang berada dalam kondisi miskin ekstrem dengan data kependudukan lainnya, diketahui jumlah penduduk miskin ekstrem saat ini mencapai 10,86 juta jiwa atau setara dengan 2,39 juta rumah tangga. Ini adalah angka yang sangat besar. Dibutuhkan kerja

“ Jumlah penduduk miskin ekstrem saat ini mencapai 10,86 juta jiwa atau setara dengan 2,39 juta rumah tangga. Ini adalah angka yang sangat besar. Dibutuhkan kerja keras dan kerja sama semua pihak untuk melakukan penanganan secara bersama mengingat hanya tersisa kurang lebih dua tahun menuju tahun 2024. ”

keras dan kerja sama semua pihak untuk melakukan penanganan secara bersama mengingat hanya tersisa kurang lebih dua tahun menuju tahun 2024.

**Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Milik Rumah Tangga Miskin Ekstrem, oleh Ditjen Perumahan**

Menindaklanjuti arahan Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan (Kemenko PMK) mengkoordinasikan langkah PKE dengan melibatkan beragam *stakeholders* melalui serangkaian intervensi fisik dan non-fisik secara bertahap. Ditjen Perumahan sebagai salah satu *stakeholders* bertanggung jawab melaksanakan perbaikan hunian milik rumah tangga miskin ekstrem secara terintegrasi dengan upaya perbaikan kualitas infrastruktur permukiman yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya.

Ditjen Perumahan melaksanakan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik rumah tangga miskin ekstrem pada lokasi prioritas yang dikoordinasikan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dengan menggunakan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pada tahun 2021, dilakukan penanganan 2.998 unit RTLH yang tersebar di Provinsi Jawa Barat (950 unit), Jawa Tengah (980 unit), dan Jawa Timur (1.068 unit). Penanganan tersebut menggunakan anggaran Rp. 59,96 Milyar yang bersumber dari APBN.

Sementara pada tahun 2022, Ditjen Perumahan akan melakukan penanganan 40.000 unit RTLH milik keluarga miskin ekstrem yang tersebar di 25 provinsi. Hingga bulan April 2022, telah ditetapkan 2.500 rumah tangga penerima bantuan perbaikan rumah yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Adapun 37.500 sisa calon penerima bantuan saat ini sedang dalam proses verifikasi lapangan secara terintegrasi dengan melibatkan Kemenko PMK, BKKBN, BPIW, dan Ditjen Cipta Karya.

“ Ditjen Perumahan melaksanakan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada lokasi prioritas yang dikoordinasikan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dengan menggunakan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). ”



Penanganan Salah Satu Rumah Milik Masyarakat Miskin Ekstrem di Desa Paninggaran Jawa Barat pada Tahun 2021

Sumber : Ditjen Perumahan

## Kolaborasi sebagai Kunci Keberhasilan Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Belajar dari pengalaman penanganan RTLH milik keluarga miskin ekstrem pada tahun 2021, diketahui bahwa praktik kolaborasi sangat dibutuhkan mulai dari tahapan pra hingga pasca-penanganan perumahan untuk memastikan ketepatan sasaran, kemampuan menjangkau semaksimal mungkin jumlah rumah tangga miskin ekstrem, serta memastikan keberlanjutan manfaat pasca intervensi yang dilakukan pemerintah. Disadari bahwa kondisi miskin ekstrem tidak akan selesai dengan perbaikan fisik rumah dan infrastruktur permukiman, namun juga membutuhkan proses perbaikan sosial-ekonomi rumah tangga.

Dalam proses persiapan penanganan, kolaborasi dilakukan dalam bentuk verifikasi lapangan secara bersama dengan melibatkan *stakeholders* terkait untuk memastikan penerima bantuan sesuai dengan sasaran program.

Dalam proses pelaksanaan perbaikan rumah, komitmen kolaborasi perlu diterjemahkan dalam bentuk penyediaan fasilitas sanitasi, jalan lingkungan dan air minum oleh Ditjen Cipta Karya atau pihak lainnya. Disamping itu, Ditjen Perumahan saat ini secara intensif antara lain sedang menggandeng Baznas untuk mendukung pelaksanaan perbaikan RTLH dalam rangka PKE. Nantinya diharapkan Baznas dapat memberikan bantuan tambahan dalam bentuk uang sehingga nilai bantuan yang diterima masyarakat meningkat atau melakukan perbaikan RTLH dengan pendampingan teknis Ditjen Perumahan pada hunian milik rumah tangga miskin ekstrem yang belum dapat ditangani pemerintah akibat keterbatasan

Disadari bahwa kondisi miskin ekstrem tidak akan selesai dengan perbaikan fisik rumah dan infrastruktur permukiman, namun juga membutuhkan proses perbaikan sosial-ekonomi rumah tangga.

anggaran. Dengan demikian, jumlah rumah tangga yang ditangani akan dapat dioptimalkan.

Selanjutnya, paralel dengan penanganan perbaikan rumah oleh Ditjen Perumahan, perlu dilakukan proses kolaborasi dalam bentuk perbaikan sosial ekonomi rumah tangga miskin ekstrem untuk meningkatkan kualitas hidup dan penghasilan keluarga. Pada tahap ini dapat dilakukan pendampingan penerapan pola hidup sehat, penyaluran beasiswa, pemberian peralatan produksi dan pendampingan pemasaran hasil produksi, pemberian modal usaha mikro, serta penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan skala lingkungan,



*Kick-off Meeting Kerja Sama Baznas dan Ditjen Perumahan  
Sumber : Ditjen Perumahan*

Proses kolaborasi ini memerlukan keterlibatan dan komitmen kementerian terkait, pemda, BUMN, BUMD, serta pelaku non-pemerintah lainnya. Menurut kami, disini sangat diperlukan peran kuat BPIW untuk menjadi *connector* dengan para *stakeholders*, integrator program, dan penjaga komitmen para *stakeholders* untuk memastikan upaya penanganan mampu mencapai tujuan yang diharapkan Presiden, yaitu 0 persen rumah tangga miskin ekstrem pada tahun 2024.(\*\*)

# Program Tahun 2022, Enam IBM Ditjen Cipta Karya Dukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem



Oleh

**Pandu Gunadi Atmosukarto, S.T., MUM**

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan per kapita per hari dibawah USD 1,9 (Bank Dunia dan PBB). Saat ini, di Indonesia angka kemiskinan ekstrem telah mencapai 4 persen atau sekitar 10,86 juta jiwa dari total penduduk Indonesia pada tahun 2021. Kondisi tersebut menjadi perhatian dan prioritas pemerintah untuk dapat melakukan upaya-upaya konkret untuk menangani kemiskinan ekstrem ini sehingga ditargetkan dapat mencapai 0 persen pada akhir tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah melalui berbagai Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya penanganan melalui program-program intervensi yang membutuhkan konvergensi sasaran maupun penganggaran dalam mencapai target penanganan kemiskinan ekstrem. Konvergensi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan ini, karena perlu dipastikan agar seluruh program penanganan terkait dapat saling bersinergi sejak tahap perencanaan, penentuan lokasi, alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program yang fokus untuk menangani lokus-lokus prioritas penanganan ditinjau dari aspek kewilayahan maupun kelompok masyarakat penerima manfaat.

Menyikapi kondisi tersebut, Bapak Wakil Presiden telah memberikan arahan kepada kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah untuk dapat segera melakukan sinkronisasi dan kolaborasi program penanganan yang difokuskan pada lokasi prioritas PKE serta memastikan masyarakat/rumah tangga sasaran penerima manfaat dari program dimaksud, termasuk melaksanakan perbaikan terhadap system tata Kelola pencapaian target nasional (*National Targetting System*)

Upaya perbaikan terhadap sistem tersebut diawali dengan perbaikan proses penetapan pencapaian target berbasis kewilayahan, terutama pada wilayah-



Penanganan PKE di Kota Solo, Jawa Tengah

Sumber: Kompu BPIW

wilayah yang merupakan kantong kemiskinan ekstrem. Berdasarkan hasil identifikasi, didapatkan sebanyak 212 kabupaten/kota dari 25 provinsi yang merupakan kantong-kantong kemiskinan dengan cakupan 75 persen dari jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional. Penanggulangan kemiskinan ekstrem akan dilakukan secara bertahap hingga mencakup 514 kabupaten/kota secara nasional pada 2023-2024.

Dalam menangani kemiskinan ekstrem, Kementerian PUPR berpedoman pada kriteria kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan pemerintah, antara lain:

1. Penghasilan USD 1,9/hari;
2. Termasuk dalam 360 kab/kota fokus penanganan *stunting* oleh Bappenas;
3. Prevalensi *stunting* tinggi, capaian akses pelayanan sanitasi layak yang rendah, capaian akses pelayanan air minum layak yang rendah; dan
4. Termasuk prioritas penanganan kawasan kumuh 2020-2024.

Salah satu arahan kebijakan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) adalah menurunkan wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan konektivitas antar wilayah. Intervensi penanganan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dalam rangka mendukung PKE melalui program-program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) di sektor ke-creta karya-an dan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) dari sektor perumahan.

Program IBM Ditjen Cipta Karya untuk penanganan PKE tersebut, meliputi program penyediaan infrastruktur dasar permukiman yang meliputi: air bersih, sanitasi, air limbah domestik, persampahan dan infrastruktur permukiman yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan menekankan pada proses pelibatan peran masyarakat di lokasi kegiatan. Program IBM dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan IBM tersebut dilaksanakan sejak tahap persiapan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pemanfaatan infrastruktur yang dibangun, khususnya pada lokasi permukiman masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program IBM Ditjen Cipta Karya dalam mendukung penanganan kemiskinan ekstrem pada tahun 2022

meliputi 3 tiga kegiatan, antara lain:

- 1) Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
- 2) Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS);
- 3) Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); dan

### Program IBM Direktorat Jenderal Cipta Karya



#### Pamsimas

Kegiatan Pamsimas di Kabupaten Serang  
Sumber : Ditjen Cipta Karya



#### Sanimas

Salah satu kegiatan Sanimas yang diikuti oleh para Ibu Rumah Tangga  
Sumber : Ditjen Cipta Karya



#### Pisew

Pembangunan program PISEW di Kecamatan Malina  
Sumber : Ditjen Cipta Karya

Pelaksanaan PKE tentu saja menemui kendala dan tantangan tersendiri, seperti: integrasi dan akurasi data, tipologi wilayah yang ditangani, hingga keberlanjutan dari intervensi program PKE. Dengan bertambahnya jumlah kabupaten/kota yang memerlukan intervensi program PKE pada tahun 2022, diperlukan proses pendataan yang akurat dan integrasi data khususnya terkait dengan informasi data penerima manfaat (*data by name by address / BNBA*) dari kegiatan penanganan stunting dari BKKBN, data sebaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Direktorat Jenderal Perumahan maupun data intervensi kegiatan IBM Ditjen Cipta Karya yang telah dilaksanakan pada periode 2020-2021 serta rencana pelaksanaan di tahun 2022.

Selanjutnya dilakukan analisis spasial melalui GIS terhadap data-data tersebut terhadap data sebaran 212 kabupaten/kota prioritas PKE tahun 2022, sehingga akan didapatkan irisan lokasi-lokasi kegiatan yang menjadi lokus prioritas penanganan hingga tingkat kecamatan dan desa kelurahan. Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokus prioritas hasil analisis tersebut, maka dilanjutkan dengan peninjauan lapangan/survei lapangan bersama dengan para *stakeholder* terkait untuk memastikan dan menentukan lokus prioritas penanganan serta kebutuhan penanganan program yang tepat bagi masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kondisi serta permasalahan yang ada di lapangan.

Kemudian, tipologi wilayah dari lokasi prioritas PKE perlu dipertimbangkan, karena setiap wilayah memiliki karakteristik tersendiri dan memerlukan intervensi program yang berbeda beda. Salah satu contohnya adalah perbedaan intervensi yang dilakukan pada Pulau Enggano dengan lokasi yang berada di Pulau Jawa. Karena penduduk di Pulau Enggano tidak padat dan jarak antar rumah yang cukup jauh, maka intervensi program yang dapat dilakukan dapat berupa penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang lebih individual, seperti penyediaan MCK individual. Hal ini berbeda dengan karakteristik permukiman di Pulau Jawa yang sudah padat, sehingga dibutuhkan intervensi program yang bersifat komunal.

Selain itu, keberlanjutan dari program-program intervensi penanganan PKE harus dipastikan agar dapat menjadi manfaat jangka panjang yang dirasakan oleh masyarakat. Setiap program yang dilakukan perlu

memperhatikan aspek-aspek penyediaan infrastruktur dasar yang aman, layak, sehingga di masa depan dapat tercipta lingkungan hunian yang *livable* dan berkelanjutan.

Kolaborasi antar Unit Organisasi di Kementerian PUPR maupun dengan Kementerian/Lembaga lain menjadi kunci utama keberhasilan dan keberlanjutan program PKE ke depan. Perlu dipastikan program-program intervensi penanganan PKE yang dilaksanakan dapat terintegrasi pada lokasi-lokasi prioritas penanganan sejak tahapan perencanaan sampai dengan tahapan implementasi di lapangan, sehingga dapat program PKE dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam upaya penanganan PKE tersebut, kolaborasi, komitmen, sinergi, dan dukungan dari semua pihak perlu untuk dilakukan, sehingga diharapkan infrastruktur PUPR yang terbangun dalam PKE dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta tidak ada lagi daerah yang masuk dalam kategori miskin ekstrem di tahun 2024 seperti arahan yang disampaikan oleh Presiden. Pada akhirnya, penanganan PKE dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan wilayah dan peningkatan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat melalui upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman.\*\*



Kepala BPIW saat survei penyediaan MCK di Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat  
Sumber: Kompu BPIW

# Penanganan Kemiskinan Ekstrem Untuk Mendorong Pemerataan Infrastruktur



Oleh

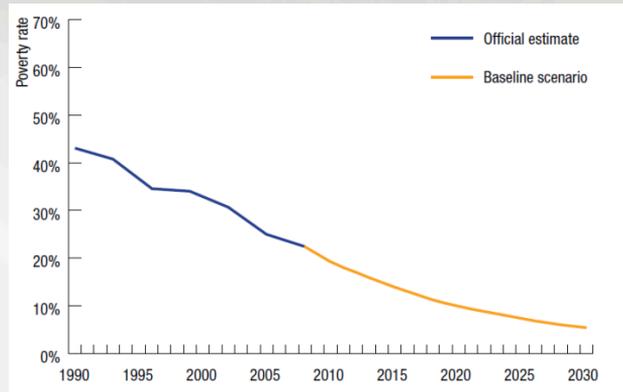
**Indra Maulana, ST, MT**

Subkoordinator Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bengkulu dan Jambi

Bidang I B, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I BPIW, Kementerian PUPR

“Tingginya angka kemiskinan ekstrem mendorong negara-negara di dunia menyepakati perlunya upaya yang komprehensif dan terkoordinasi untuk menyelesaikan isu ini pada tahun 2030. Kemiskinan dianggap dapat menimbulkan efek yang multi dimensi.”

Tujuan utama dan pertama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah upaya untuk mengakhiri kemiskinan. Isu kemiskinan ini diharapkan dapat diakhiri dalam segala bentuknya dan di mana pun adanya (*end poverty in all its forms everywhere*). Selama dua setengah dekade terakhir, kemiskinan ekstrem global telah menurun dengan cepat. Sejak tahun 1990, prosentase populasi dunia yang termasuk kemiskinan ekstrem telah turun dari 35,6 persen pada tahun 1990 menjadi 10,0 persen pada tahun 2015 (Bank Dunia, 2018). Tingginya angka kemiskinan ekstrem mendorong negara-negara di dunia menyepakati perlunya upaya yang komprehensif dan terkoordinasi untuk menyelesaikan isu ini pada tahun 2030. Kemiskinan dianggap dapat menimbulkan efek yang multi dimensi karena bukan hanya menyangkut rendahnya pendapatan, melainkan karena menyangkut: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) ada/tidaknya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidaknya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan yang layak (Bappenas, 2020).



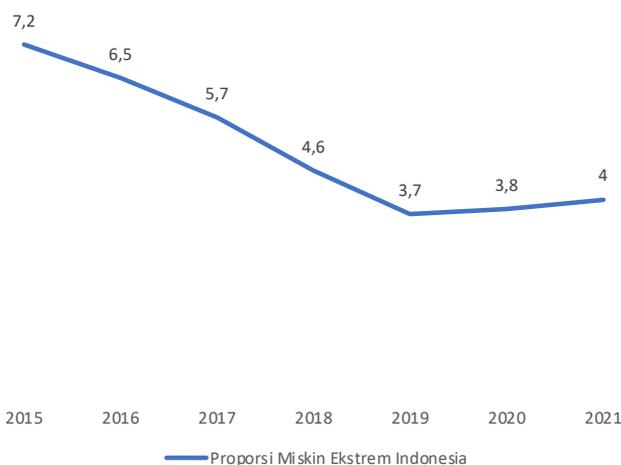
Skenario pengurangan kemiskinan ekstrem 1990-2030  
Sumber : Bank Dunia

Indonesia menjadi bagian dari upaya mengakhiri kemiskinan dengan menggulirkan program Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) yang dimulai dengan turunnya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Upaya penanganan kemiskinan ini kemudian diperluas dengan target terentaskannya kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 yang dicanangkan oleh Presiden pada kuartal pertama 2021. Berdasarkan data BPS 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa (relatif turun

PKE tentunya akan berjalan dengan optimal ketika seluruh sektor bergerak secara terpadu dengan program yang diusungnya. Kementerian PUPR termasuk salah satu sektor yang menjadi tulang punggung program PKE melalui penyediaan infrastruktur.

dalam lima tahun terakhir). Bila dikaitkan dengan angka kemiskinan nasional yang mulai menurun di angka kurang dari 10 persen, tentunya kemiskinan ekstrem ini perlu menjadi perhatian khusus. Pandemi Covid-19 ternyata meningkatkan angka kemiskinan ekstrem antara 2020-2021 yang menyentuh beberapa kelompok rentan, walau di sisi lain memberikan peningkatan kesejahteraan untuk mereka yang bergerak di sektor kesehatan dan teknologi informasi.

Proporsi Miskin Ekstrem Indonesia (dalam persen)



Proporsi Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Tahun 2015-2021

Terdapat perbedaan karakter miskin perkotaan dan miskin non perkotaan. Di perkotaan kemiskinan biasanya diakibatkan oleh adanya urbanisasi yang tinggi yang didorong oleh sekelompok masyarakat mencari penghidupan yang lebih baik di kota namun dengan keterampilan yang minim dan umumnya bekerja di sektor informal. Sedangkan di non perkotaan, kemiskinan didorong oleh rendahnya akses terhadap

infrastruktur yang memadai (pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan permukiman), pekerjaan informal, atau pola pikir yang kurang berkembang. Kurangnya akses terhadap sumber daya menyebabkan adanya kemiskinan struktural. Sedangkan sikap masyarakat yang menyikapi kondisi miskinnya sebagai sesuatu yang sulit diubah sehingga menyebabkan sikap pemalas dan tidak kreatif digolongkan sebagai kemiskinan kultural. Program PKE diharapkan akan menjadi solusi bagi pola-pola kemiskinan tersebut.

PKE tentunya akan berjalan dengan optimal ketika seluruh sektor bergerak secara terpadu dengan program yang diusungnya. Kementerian PUPR termasuk salah satu sektor yang menjadi tulang punggung program PKE melalui penyediaan infrastruktur. Dalam upaya PKE ini, Kementerian PUPR memfokuskan pada infrastruktur perumahan dan permukiman, terutama dalam peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) dan penyediaan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat seperti sanitasi dan air minum.

Dengan jangkauan PKE tahun 2021 (35 kabupaten/kota di tujuh provinsi) yang dilanjutkan dengan tahun 2022 untuk 212 kabupaten/kota, 25 provinsi dan lebih dari 97 ribu RTLH, maka menjadi tantangan terkait kapasitas sumber daya yang tersedia untuk menuntaskan isu kemiskinan ini. Akurasi data yang disertai dengan verifikasi dan validasi di lapangan menjadi tahapan penting untuk memastikan agar program PKE ini tepat sasaran. Pelibatan multi *stakeholder* yang dilakukan Kementerian PUPR beserta Kemenko PMK, BKKBN, pemerintah daerah

sampai ke level desa, RT/RW memberikan kesan bahwa PKE memang bukan domain satu pihak.

Akhir tahun 2021 penulis sempat terlibat dalam survei kolaborasi PKE di Pulau Enggano. Wilayah yang secara administratif merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara ini berpenduduk lebih dari 4 ribu jiwa yang tersebar di enam desa. Pulau Enggano merupakan Pulau 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) yang ditetapkan melalui Keppres Nomor 6 tahun 2017 tentang Pulau-pulau Kecil Terluar. Di dalam RPJMN

“Kementerian PUPR memfokuskan pada infrastruktur perumahan dan permukiman, terutama dalam peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) dan penyediaan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat seperti sanitasi dan air minum.”

2020-2024, pulau ini merupakan *major project* yang memerlukan penanganan serius utamanya dalam pembangunan infrastruktur.

Data tahun 2020 dari BPS Kabupaten Bengkulu Utara memperlihatkan bahwa tingkat kesejahteraan di Pulau Enggano masih jauh dari standar yang layak. Wilayahnya yang relatif terisolir menyebabkan pulau dengan komoditas ekonomi yang sebenarnya sangat potensial, menjadi kurang berkembang. Keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti sarana transportasi, jalan, pendidikan, kesehatan, energi dan telekomunikasi menjadi faktor yang dominan dalam ketertinggalan Pulau Enggano.

Hasil verifikasi dan validasi di lapangan menunjukkan terdapat 250 RTLH dengan kondisi : struktur bangunan rumah yang rapuh, tidak tersedianya sanitasi, air minum dan sarana pengolahan limbah yang layak. Hal ini ditambah dengan rusaknya jalan akses, pantai kritis di hampir sepanjang garis pantai, tidak berfungsinya listrik 24 jam, jaringan telekomunikasi yang sangat terbatas (banyak *blank spot*). Hal ini adalah gambaran nyata betapa wilayah Enggano memerlukan penanganan untuk pemenuhan infrastruktur dasar. Keterbatasan akses ini disertai dengan profil wilayah Pulau Enggano yang sangat rawan terhadap gempa bumi dan tsunami sebagai akibat dari pergerakan Sesar Enggano dan penunjaman Sunda *Megathrust*.

Pemerataan pembangunan infrastruktur sangat diperlukan agar wilayah-wilayah Pulau 3T mampu meningkatkan daya saingnya sehingga komoditas ekonominya bisa terjual ke luar pulau. Program PKE bisa menjadi langkah terobosan untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan pemerataan, dan menghapuskan kemiskinan di kawasan ini.

Penelitian dari Bank Dunia pada tahun 2020 menyatakan bahwa penurunan indeks gini di setiap negara sebesar 1 persen per tahun dapat mengurangi tingkat kemiskinan global sekitar 6.3 persen pada tahun 2030, yang artinya setara dengan 89 juta lebih

sedikit orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Mengurangi indeks gini setiap negara sebesar 1 persen per tahun memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan kemiskinan global daripada meningkatkan pertumbuhan tahunan masing-masing negara sebesar 1 poin persentase. Merujuk dari hal ini, upaya pemerintah melalui PKE yang mencoba meningkatkan akses infrastruktur layak bagi masyarakat miskin ekstrem merupakan kebijakan yang sangat baik untuk mengimbangi investasi infrastruktur di kawasan-kawasan ekonomi yang cepat tumbuh seperti kawasan industri dan kawasan pariwisata. (\*\*)



Akses Jalan di Desa Kaana

Sumber : BPIW 2021



Akses Jembatan di Desa Malakoni

Sumber : BPIW 2021



RTLH di Desa Banjarsari

Sumber : BPIW 2021

“Program PKE bisa menjadi langkah terobosan untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan pemerataan, dan menghapuskan kemiskinan di kawasan Enggano ini.”

MEMBANTU TERCAPAINYA SDGs DESA\*  
9 - 11 MARET 2022 | HOTEL VASA, SURABAYA



Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra saat berbicara dukungan Kementerian PUPR terhadap kawasan transmigrasi di Surabaya, 9 Maret lalu.

Sumber: Kompu BPIW

## Kementerian PUPR Dukung Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi

Kondisi kawasan perdesaan dan transmigrasi di Indonesia relatif memiliki potensi yang melimpah, namun kadang belum tergarap secara optimal. Kondisi kawasan di perdesaan dan transmigrasi pun masih tertinggal, baik dari sisi fasilitas pelayanan sosial, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, keamanan, dan sebagainya dari perkotaan. Untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen melakukan pengembangan infrastruktur di Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi.

Kementerian PUPR berkomitmen melakukan percepatan pengembangan infrastruktur kawasan perdesaan dan transmigrasi. Hal itu diterangkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra saat menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi yang digelar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) di Surabaya, Rabu 10 Maret 2022 lalu.

Arief menyampaikan, dukungan infrastruktur PUPR di kawasan

perdesaan dan transmigrasi dilaksanakan untuk mendukung pengembangan fisik dan ekonomi. "Hal itu sesuai batas kewenangan penanganan infrastruktur Kementerian PUPR," ungkapnya.

la juga menyatakan untuk mendorong percepatan pertumbuhan kawasan, dibutuhkan keterpaduan implementasi program yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga (K/L), seperti Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan lainnya. "Dan juga lintas kewenangan, baik pusat dan

daerah untuk program-program yang bersifat fisik maupun non-fisik," jelas Arief.

Arief juga menyampaikan terkait tipologi dukungan infrastruktur PUPR dalam pengembangan perdesaan dan transmigrasi diantaranya, sektor Sumber Daya Air yaitu jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian dan sumber air baku bagi masyarakat, sektor jalan/konektivitas yakni jalan akses menuju titik-titik pemasaran untuk mempermudah distribusi hasil pengolahan komoditas unggulan.

Kemudian untuk sektor Cipta Karya yaitu jalan akses dari lahan produksi ke pusat pengolahan, seperti jalan poros desa, jalan usaha tani, dan jalan lingkungan. Kemudian, bangunan pengolahan komoditas unggulan menjadi *intermediate product*, bangunan pemasaran lokal, dan infrastruktur permukiman bagi masyarakat. Sedangkan sektor Perumahan yaitu rumah layak huni bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Arief menyatakan bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR 2022 beberapa waktu yang lalu, terdapat 8 Kawasan Transmigrasi (KT) / Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang menjadi prioritas mendapat dukungan program Kementerian PUPR. Delapan kawasan tersebut yaitu KT Pulubala-Gorontalo, KPPN Mamuju-Sulbar, KT Gerbang Mas Perkasa, KPPN Manokwari-Papua Barat, KPPN Dompus-NTB, KT Senggi, KT Muting dan KT Salor-Merauke Papua.

la menambahkan, Kementerian PUPR saat ini mempunyai kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) dari Direktorat Jenderal Perumahan di 212 kota/kabupaten seluruh Indonesia. Dari 212 lokasi tersebut ada yang beririsan dengan lokus 52 KT.

Program IBM merupakan program penyediaan infrastruktur dasar meliputi air bersih, sanitasi, limbah, dan infrastruktur permukiman yang menekankan partisipasi masyarakat. Program tersebut meliputi Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Perdesaan Padat Karya, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas),

Program BSPS yakni bantuan pemerintah bagi warga untuk mendorong dan meningkatkan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya. "Saat ini ada dua bentuk BSPS, yaitu Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS), dimana untuk penanganan miskin ekstrem akan difokuskan pada Peningkatan PKRS," terangnya.

Acara Rakornas Transmigrasi ini dibuka oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar serta dihadiri oleh Perwakilan Kementerian/ Lembaga anggota Tim Perpres Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi ketransmigrasian. Kegiatan ini diakhiri dengan forum desk K/L yang membahas program detail pengembangan kawasan transmigrasi dalam mencapai target RPJMN 2020 - 2024. **(Daris/berbagai sumber)**



*Para transmigran mendapat dukungan pelatihan pertukangan.*  
Sumber: [disnakertrans.kapuashulukab.go.id](http://disnakertrans.kapuashulukab.go.id)



*Permukiman di kawasan transmigrasi.*  
Sumber: [pilarbangsanews.com](http://pilarbangsanews.com)

# Pengembangan Infrastruktur Mendukung KSPN TN Danau Sentarum



Oleh

**Luhur Selo Baskoro, S.E.**

Perencana Ahli Muda  
Pusat Pengembangan  
Infrastruktur PUPR Wilayah I BPIW  
Kementerian PUPR

**Borris Afdhal Anwar, S.T., M.Eng**

Analisis Perencanaan  
Pusat Pengembangan  
Infrastruktur PUPR Wilayah I BPIW  
Kementerian PUPR

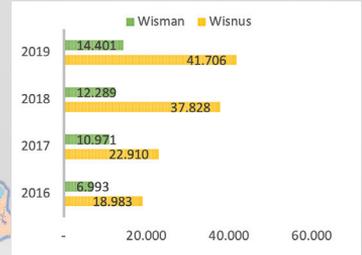
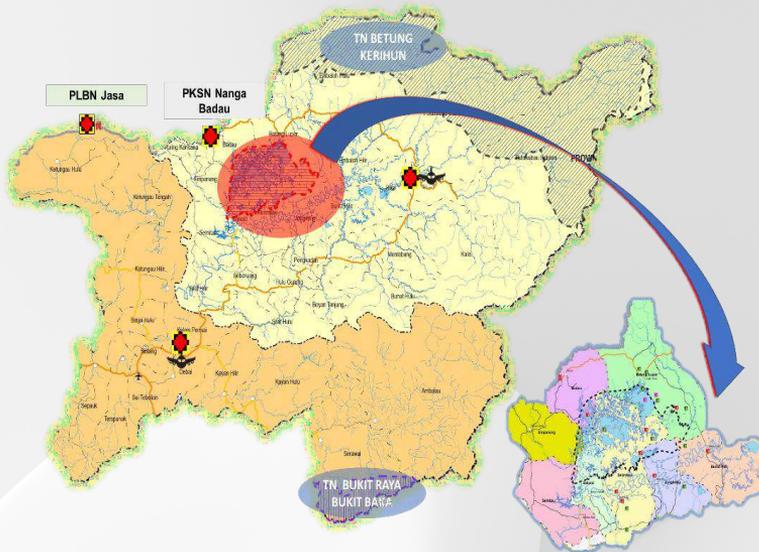
*Taman Nasional Danau Sentarum  
Sumber :wikipedia*

Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) merupakan rumah bagi 510 spesies tumbuhan dan 33 spesies endemik TNDS, 141 spesies hewan mamalia TNDS, dan 29 spesies lain diantaranya spesies endemik, lebih dari 300 jenis burung, dan juga merupakan habitat ikan air tawar terlengkap di dunia. Kawasan Sentarum dan sekitarnya juga menjadi salah satu citra pariwisata nasional Indonesia dengan ditetapkannya menjadi salah satu KSPN dalam PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS.

Dalam upaya peningkatan jumlah wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, perlu dilakukan pengembangan kawasan wisata yang ditinjau atas 3 aspek yaitu aksesibilitas, amenities dan atraksi. Dalam hal ini, Kementerian PUPR dapat berperan mendukung aksesibilitas menuju kawasan pariwisata melalui penyelenggaraan jalan jembatan, dan aspek amenities melalui penyediaan infrastruktur dasar antara lain suplai air bersih penyediaan sanitasi, persampahan, air baku dan penataan kawasan, serta penanganan pendangkalan danau.

Danau Sentarum merupakan sumber dari aliran sungai kapuas, salah satu sungai terpanjang di Indonesia yang dalamnya hidup berjuta flora dan fauna. Setiap tahunnya selama 10 bulan danau ini di penuh air, dan ketika surut danau akan terlihat seperti membentuk kolam-kolam kecil yang diisi oleh ikan-ikan kecil. Fenomena alam ini merupakan daya tarik wisata yang berpotensi mendatangkan wisatawan.

Posisi Danau Sentarum yang dekat dengan kawasan perbatasan Nanga Badau menjadikan kawasan ini dapat diakses dengan mudah oleh wisatawan asing melalui PLBN Nanga Badau yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, kunjungan ke TNDS sebelum pandemi Covid-19 terbilang cukup besar, dimana pada Tahun 2019 total kunjungan ke Danau Sentarum berjumlah 56.107 orang yang terdiri dari 41.706 wisatawan nusantara dan 14.401 wisatawan



Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum

KAWASAN TNDS

Sumber :Dok. BPIW

Destinasi tujuan wisata (DTW) Danau Sentarum tersebar di sekitar danau, beberapa merupakan DTW unggulan, diantaranya DTW Pulau Tekenang, Jembatan Wisata, Bukit Semujan, Pulau Sepandan, dan Bukit Babi.

DTW unggulan, diantaranya DTW Pulau Tekenang, Jembatan Wisata, Bukit Semujan, Pulau Sepandan, dan Bukit Babi.

mancanegara, meningkat 11,95 persen dari tahun 2018. Untuk itu, pengembangan wisata Taman Nasional Danau Sentarum diharapkan dapat menjadi salah satu pengungkit peningkatan perekonomian nasional dengan prinsip pembangunan kawasan ekonomi pariwisata yang berkelanjutan berdasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup.

Kawasan TNDS dapat diakses melalui jalur darat dan udara. Pintu Masuk utama menuju kawasan TN Danau Sentarum terletak di Desa Lanjak Kecamatan Batang Lupar. Terdapat tiga rute untuk menuju kawasan TNDS meliputi:

1. Rute pertama: jalur darat dari Pontianak yang berjarak + 700 km, melalui rute Pontianak – Sintang – Putussibau – Lanjak
2. Rute kedua: melalui moda transportasi udara Pontianak – Putussibau (+ 1,5 jam perjalanan udara)

### Profil Kawasan TN Danau Sentarum

Secara administrasi Kawasan TNDS terletak di 8 kecamatan dan 12 desa di Kabupaten Kapuas Hulu, ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Kehutanan dengan Nomor SK 4815/ Menhut-VII/KUH/2014 dengan luas kawasan total 127.390,40 ha yang juga ditetapkan sebagai cagar biosfer dan bagian dari KSN Heart of Borneo. Destinasi tujuan wisata (DTW) Danau Sentarum tersebar di sekitar danau, beberapa merupakan



Jalur Taman Nasional Danau Sentarum

Sumber :Dok. BPIW

kemudian dilanjut perjalanan darat menuju Lanjak sejauh +119 km

3. Rute ketiga untuk wisatawan dari Sarawak (Malaysia) melalui PLBN Nanga Badau, kemudian dilanjut perjalanan darat sejauh + 45 km.

Ketiga alternatif konektivitas menuju TNDS Sentarum tersebut sudah dilalui jalan nasional ruas Putussibau – Tanjung Kerja – Mataso – Lanjak dari arah Putussibau dengan total panjang 118,57 km, lebar rata-rata 5,85 meter, kondisi jalan bagus dengan kemantapan jalan 99,35 persen, dan nilai VCR 0,07. Sedangkan alternatif dari arah Sarawak (Malaysia) yang melalui PLBN Nanga Badau dilalui oleh jalan nasional ruas Batas Serawak – Nanga Badau – Lanjak dengan panjang total 44,92 km, lebar rata-rata 6,35 meter, kemantapan jalan 100 persen dan nilai VCR 0,12.



Peta Taman Nasional Danau Sentarum

Sumber :Dok. BPIW

### Isu Strategis

Berdasarkan data diatas, kualitas jalan nasional pada kawasan tersebut sudah bagus, namun masih terdapat beberapa jembatan dengan konstruksi perkerasan kayu meliputi jembatan Sungai Nyamuk (panjang 13 meter), Jembatan Parapulau (panjang 6,1 meter) pada ruas Putussibau – Tanjung Kerja, jembatan Sei Mayong I (panjang 9,7 meter), dan jembatan Sei Mayong II (panjang 10,1 meter) pada ruas Mataso – Tanjung Kerja.

Untuk sektor sumber daya air, terjadi pendangkalan pada danau yang disebabkan oleh sedimentasi yang

“ Diperlukan strategi pengembangan kawasan melalui penyediaan infrastruktur PUPR dan non PUPR yang juga mengantisipasi pertambahan jumlah wisatawan meliputi peningkatan konektivitas darat, laut, dan udara “

cukup tinggi (80 -160 mg/l pada musim hujan), serta belum optimalnya pemanfaatan air danau sebagai sumber air baku dan air minum. Isu strategis pada sektor permukiman yaitu belum tertatanya perkampungan nelayan di sekitar danau, pelayanan air minum yang masih rendah yaitu 42 persen, akses sanitasi yang masih rendah yaitu 52 persen, serta pengelolaan persampahan permukiman dan kawasan yang belum

optimal. Isu strategis lainnya yaitu akses komunikasi yang terbatas, keterbatasan listrik dan bahan bakar minyak, minimnya kualitas dan kuantitas produksi dari produk rumah tangga, dan minimnya pemasaran produk dan pariwisata.

### Strategi Pengembangan Infrastruktur Kawasan

Untuk menjawab isu-isu strategis diatas, diperlukan strategi pengembangan kawasan melalui penyediaan infrastruktur PUPR dan non PUPR yang juga mengantisipasi pertambahan jumlah wisatawan meliputi peningkatan konektivitas darat, laut, dan udara menuju kawasan, peningkatan dukungan air minum dan sanitasi di kawasan pariwisata, pengelolaan persampahan permukiman dan kawasan, penataan kawasan permukiman nelayan.

Selain itu layanan infrastruktur mendorong pengembangan kawasan juga dibutuhkan dalam peningkatan konektivitas produksi dan distribusi komoditas unggulan (madu, ikan konsumsi, dan ikan hias), pengendalian sedimentasi dan pendangkalan

danau, pengembangan penyediaan air baku, peningkatan kualitas lingkungan, dan pengembangan atraksi wisata buatan.

**Kebutuhan Infrastruktur PUPR**

Pada sektor sumber daya air, kebutuhan air baku dan air minum masyarakat mengemuka dan memerlukan infrastruktur seperti *dam* dan *intake*. Untuk penanganan pendangkalan danau mengurangi sedimen akhir perlu dilakukan penangan pada bagian hulu sungai yang masuk ke Danau Sentarum yaitu berupa pembangunan pengendali sedimen dan perkuatan tebing sungai.

Dalam rangka peningkatan konektivitas menuju kawasan, dinataranya dibutuhkan program pelebaran jalan yang belum standar (< 7 meter), dan penggantian konstruksi jembatan kayu yang berjumlah empat jembatan.

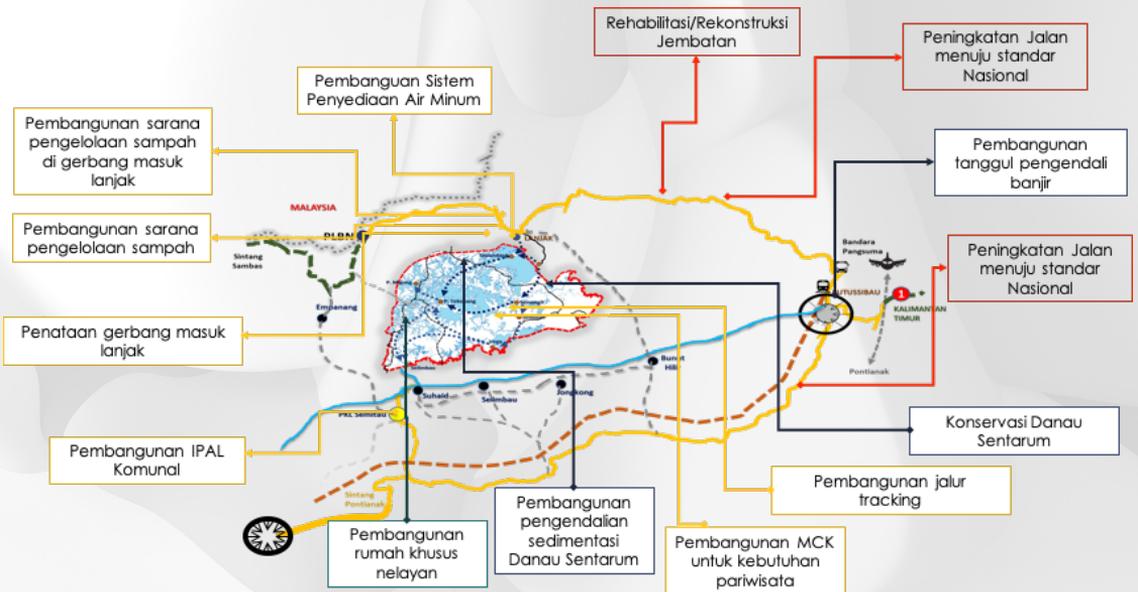
Pada sektor Cipta Karya dan Perumahan, dibutuhkan penyediaan air minum pada daerah yang belum terlayani PDAM dengan *Gap* sebesar 48 persen. Sedangkan untuk sanitasi dengan *gap* masih 48 persen, perlu peningkatan layanan sanitasi baik individual maupun komunal. Selain itu, dibutuhkan sarana pengelolaan sampah skala kawasan/TPS untuk menangani timbulan sampah baik dari penduduk dan

“ Pemetaan program prioritas diharapkan mampu pembangunan infrastruktur PUPR akan menjadi lebih terstruktur, sehingga target pengembangan potensi kawasan wisata TNDS akan lebih mudah dicapai. ”

wisatawan, termasuk pengelolaannya khususnya yang untuk kategori sampah yang masih bernilai ekonomis bagi penduduk. Untuk permukiman nelayan disekitar danau, perlu dilakukan penataan skala kawasan dan penyediaan rumah khusus nelayan maupun program stimulan perumahan swadaya.

**Kesimpulan**

Berdasarkan data dari Balai Besar TNBKDS bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 telah terjadi peningkatan jumlah kunjungan ke kawasan TN Danau Sentarum, yang menjadi potensi untuk dikembangkan. Wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum pada tahun 2019 sekitar 26 persen dari total kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rata-rata 24 persen pertahunnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam kajian Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan Infrastruktur PUPR Mendukung Kawasan Wisata Danau



Peta Taman Nasional Danau Sentarum

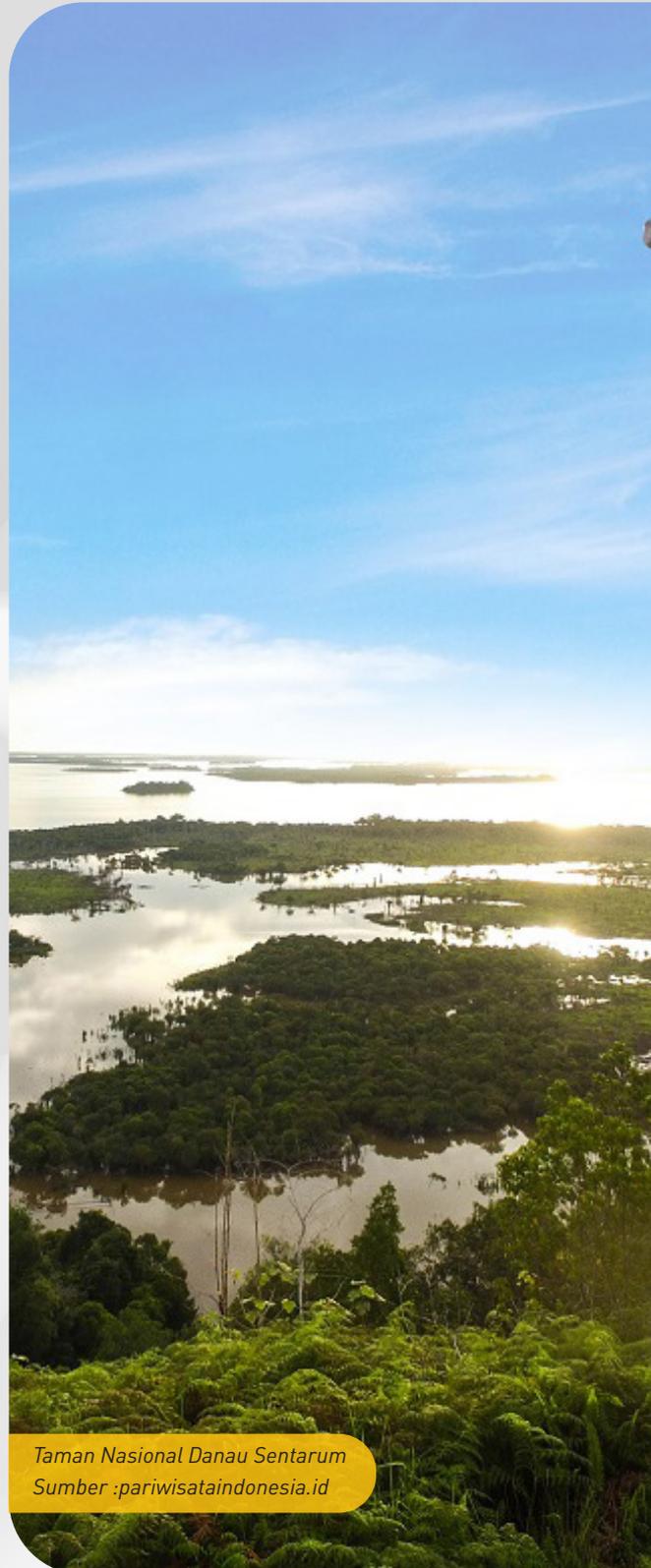
Sumber :Dok. BPIW

Sentarum Dan Sekitarnya Sebagai Kawasan Warisan Dunia, kawasan wisata ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan dengan dukungan infrastruktur sebagai faktor yang diyakini mampu meningkatkan peluang pertumbuhan ekonominya. Sektor Cipta Karya dinilai memiliki pengaruh paling besar, disusul Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Perumahan.

### **Rekomendasi**

Pemetaan program prioritas diharapkan mampu pembangunan infrastruktur PUPR akan menjadi lebih terstruktur, sehingga target pengembangan potensi kawasan wisata TNDS akan lebih mudah dicapai. Beberapa rekomendasi yang diusulkan diantaranya di sektor SDA yaitu Konservasi Danau Sentarum di DAS Kapuas, Pembangunan Tanggul Pengendali Banjir (Putussibau), Pembangunan Pintu Air (Putussibau), dan Pembangunan pengendalian sedimentasi Danau Sentarum. Untuk sektor Bina Marga, diusulkan Pelebaran Jalan Nasional menuju standar dari arah Pontianak – Putussibau – Lanjak – Nanga Badau dan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jembatan.

Untuk sektor Cipta Karya diantaranya diusulkan Pembangunan Sarana Air Bersih, Pembangunan IPAL Komunal, Pembangunan MCK untuk kebutuhan pariwisata, Pembangunan TPS, Pengelolaan sampah gerbang masuk kawasan Lanjak, Pembangunan sarana pengelolaan sampah masyarakat dan kawasan wisata, Penataan Gerbang Masuk Kawasan Lanjak, dan Pembangunan Jalur *Tracking*. Untuk sektor perumahan diusulkan Pengembangan Rumah Khusus Nelayan, Program Stimulan Perumahan Swadaya, dan Pembangunan Rumah Khusus untuk kawasan wisata (*homestay*). (\*\*)



*Taman Nasional Danau Sentarum*  
Sumber : [pariwisataindonesia.id](http://pariwisataindonesia.id)



Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra bersama tim survei kawasan kumuh perkotaan di Lombok, Nusa Tenggara Barat

Sumber :Kompu BPIW

## Ada Harapan Besar Kemiskinan Ekstrem 0 Persen di 2024 Dapat Terealisasi

Program pemerintah terkait kemiskinan ekstrem tak luput dari sorotan beberapa media nasional. Banyak hal yang disoroti media massa terkait program tersebut. Media tirto.id pada 27 Jan 2022 misalnya, mengambil judul "Kemiskinan Ekstrem 0 persen di Indonesia, Realita Atau Utopia Belaka?".

Tajuk ini menyoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan kemiskinan ekstrem untuk mencapai 0 persen pada 2024. Ia mengumumkan hal tersebut pada 4 Maret 2020, dua hari setelah kasus COVID-19 pertama diumumkan dan tepat sehari sebelum Indonesia mengeluarkan himbauan terkait COVID-19. Media ini berharap target tersebut bukan utopia belaka, tapi benar-benar direalisasikan yang melibatkan semua pihak.

Sedangkan mediaindonesia.com di artikelnya pada 1 April 2022 lalu memandang bahwa untuk menghapus kemiskinan ekstrem, sudah seharusnya menjadikan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan. Upaya menghapus kemiskinan ekstrem dapat dilakukan dengan meningkatkan *human capability*, tidak sekadar *human capital*.

Setelah melakukan pemetaan dengan data yang akurat, bagi media ini pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan dengan menyiapkan masyarakat miskin ekstrem supaya mampu bertahan di pasar bisnis global. Kompas.id pada 13 April 2022 mengangkat pernyataan dari sejumlah anggota Komisi V DPR RI yang berharap data acuan akurat sehingga program tidak salah sasaran.

Dari sejumlah media tersebut, redaksi melihat ada sebuah

“ Dari sejumlah media tersebut, redaksi melihat ada sebuah harapan besar, bahwa program kemiskinan ekstrem 0 persen di 2024, benar-benar terealisasi ”

Tidak hanya itu, keakuratan data juga menjadi sorotan media massa, agar program penanganan kemiskinan ekstrem ini tepat sasaran. Hal itu juga dipahami Kementerian PUPR. Data yang didapat dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diverifikasi di lapangan oleh Kementerian PUPR.

harapan besar, bahwa program kemiskinan ekstrem 0 persen di 2024, benar-benar terealisasi dan dapat membantu masyarakat agar terbebas dari kemiskinan ekstrem tersebut. Terkait hal itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan bahwa Kementerian PUPR berkomitmen melakukan intervensi infrastruktur melalui sejumlah program seperti Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dari Ditjen Cipta Karya (CK) dan Program Penyediaan Perumahan berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Ditjen Perumahan.

Tidak hanya itu, keakuratan data juga menjadi sorotan media massa, agar program penanganan kemiskinan ekstrem ini tepat sasaran. Hal itu juga dipahami Kementerian PUPR. Data yang didapat dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diverifikasi di lapangan oleh Kementerian PUPR.

Tidak hanya itu, agar survei tersebut lebih efisien dan efektif, BPIW Kementerian PUPR menggagas pembuatan *Standard Operating Procedure* (SOP) Survei Kolaborasi dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem dan *stunting* tahap II.



Kepala BPIW memantau unit rumah yang sudah direnovasi  
Sumber :Kompu BPIW



Rumah warga di kawasan Kemiskinan Ekstrem  
Sumber :Kompu BPIW



Agar survei tersebut lebih efisien dan efektif, BPIW Kementerian PUPR menggagas pembuatan *Standard Operating Procedure (SOP)* Survei Kolaborasi dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting tahap II.



Dengan dibuatnya SOP ini, dapat memperjelas tugas saat survei terutama masing-masing unor di lingkungan Kementerian PUPR baik yang ada di pusat maupun di daerah. Data-data hasil survei harus dipertanggungjawabkan dengan penandatanganan berita acara survei yang dilakukan tim dari unor-unor terkait.

Persiapan survei dibagi dalam tiga tahap yakni tahap Pembentukan Tim Survei, Pelaksanaan Koordinasi Awal (secara daring), dan Penyiapan Perangkat Survei. Pada tahap Pembentukan Tim Survei dilakukan penyusunan jadwal dan lokasi survei. Selain itu dilakukan pembentukan tim kolaborasi dan penyampaian nama pelaksana survei yang terdiri dari perwakilan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ditjen Cipta Karya (Unor - Balai), Ditjen Perumahan (Unor - Balai), BPIW, dan Pemerintah Daerah.

Sedangkan tahap Pelaksanaan Koordinasi Awal (secara daring) bertujuan untuk koordinasi jadwal dan lokasi survei, konfirmasi terkait status pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada lokasi survei, konfirmasi terkait apakah lokasi survei representatif untuk disurvei, dan pengecekan terhadap data BNBA (NIK double), dan apakah sudah pernah mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi awal ini adalah BKKBN, Ditjen Cipta Karya dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), Ditjen Perumahan dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P), BPIW, dan Pemerintah Daerah.

Dengan melibatkan banyak pihak, diharapkan pembangunan infrastruktur PUPR untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, sehingga target 0 persen kemiskinan ekstrem di 2024 dapat terwujud. **(Hendra)**



Sumber: Kompiu BPIW

[bpiw.pu.go.id](http://bpiw.pu.go.id)

### Ulusan

#### Setyo Purnomo, S.E., M.A.

Analisis Kepegawaian Muda Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat BPIW



Pengenalan Organisasi BPIW dalam rangka Orientasi Tugas CPNS Kementerian PUPR Formasi Tahun 2021. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin, 21 Maret 2021 di Auditorium Kementerian PUPR dihadiri oleh 264 CPNS secara langsung dan diikuti oleh 792 CPNS melalui media daring/*online*. Ini sebagai bentuk komitmen BPIW dalam mendukung rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dalam memberikan bekal dasar bagi para CPNS Kementerian PUPR untuk dapat bekerja dengan optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan memahami tugas masing-masing Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR. Rangkaian program pembinaan awal CPNS terdiri atas empat bagian besar yaitu 1) Orientasi Tugas; 2) Pembinaan Perilaku Dasar; 3) Pembinaan Profesi; dan 4) Aktualisasi Kompetensi.

Semua kegiatan tersebut dilaksanakan sepanjang Maret 2022 dan direncanakan berakhir pada Februari 2023. Secara khusus bagi BPIW, pengenalan ini diperlukan agar para CPNS mengetahui dan memahami peran penting BPIW

dalam pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.

Moderator Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat BPIW yang menyampaikan secara singkat profil Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan dilanjutkan penyampaian materi oleh Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Iwan Nurwanto. Profil BPIW memperkenalkan tugas dan fungsi BPIW, struktur organisasi dan pejabat pengampu di BPIW serta potensi sumber daya manusia yang dimiliki BPIW.

Selanjutnya disampaikan isu strategis pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur PUPR, diteruskan dengan kegiatan strategis BPIW khususnya tahun 2022 yang mencakup penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah, penyelenggaraan ITDP, sinkronisasi program pembangunan Infrastruktur PUPR, integrasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kementerian PUPR dan pemanfaatan sistem informasi dalam pengembangan infrastruktur wilayah serta tantangan BPIW ke depan.

## BPIW Berperan Penting Dalam Pengembangan Infrastruktur

BPIW Kementerian PUPR memiliki peran penting dalam pengembangan infrastruktur. "Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah menentukan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur PUPR," ungkap Sekretaris BPIW, Iwan Nurwanto saat paparan pengenalan organisasi BPIW, Kebijakan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Terpadu Berbasis Pengembangan Wilayah dalam kegiatan "Orientasi Tugas CPNS Kementerian PUPR Formasi Tahun 2021" di Auditorium Kementerian PUPR, Senin, 21 Maret 2022.

Iwan mengungkapkan, sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, BPIW memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pengembangan wilayah. (\*\*)

Intinya dalam perencanaan hendaknya memperhatikan indikator-indikator yang bisa terukur dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunannya.

Video profil BPIW dan video produk BPIW ditayangkan sebagai bentuk visual terkait dengan ITMP Danau Toba dan pengembangan wilayah Labuan Bajo membuat para peserta tertarik akan peran BPIW. Tugas dan fungsi BPIW sebagai pengarah pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia dan peran vital BPIW dalam pembangunan infrastruktur terpadu tersirat dalam video tayangan yang ditampilkan. Turut ditayangkan pula video profil generasi muda BPIW, menampilkan tiga PNS muda BPIW yaitu Shafira Hidayat, Jingga Sekarlangit dan Barkah Wibowo dalam menggambarkan pelaksanaan tugas sehari-hari pegawai di BPIW.

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah berhasil mendapatkan perhatian dari para CPNS yang hadir secara langsung maupun melalui media *online*. (\*\*)

## Matangkan Rencana Pengembangan RTP Kemayoran

BPIW Kementerian PUPR terus mematangkan rencana penanganan Pengembangan Ruang Terbuka Publik (RTP) Kemayoran di DKI Jakarta. Demikian terungkap dalam Rapat Pengembangan RTP Kemayoran yang dipimpin Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra secara virtual *zoom meeting*, Jumat sore, 25 Februari 2022.

Saat membuka rapat, Arief mengatakan, BPIW dalam penanganan RTP Kemayoran melakukan fasilitasi untuk melakukan sinkronisasi program dari Ditjen Cipta Karya dan Sumber Daya Air (SDA). BPIW diberi amanah untuk menterpadukan kegiatan yang dilakukan oleh setiap unit organisasi (Unor) termasuk waktu pentahapan pembangunannya. (\*\*)

Mengindahkan arahan Bapak Menteri PUPR untuk menterpadukan program pengembangan Ruang Terbuka Publik (RTP) Kemayoran yang melibatkan Unit Organisasi (Unor) Sumber Daya Air dan Cipta Karya, serta Pusat Pengelola Kawasan (PPK) Kemayoran, BPIW tengah menginisiasi keterpaduan program guna meningkatkan kualitas danau kemayoran sebagai sumber air, kegiatan wisata, serta kawasan ruang terbuka hijau.

Keterpaduan perlu dibangun mengingat keterkaitan antar sektor sangat erat karena dalam kawasan yang sama terdapat berbagai tingkat kewenangan: PPK Kemayoran sebagai pengelola kawasan dan pemilik lahan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terkait pengelolaan Danau Kemayoran sebagai sumber air baku dan pengendali banjir, serta Direktorat Jenderal Cipta Karya terkait pengolahan limbah dan penyediaan air minum untuk Kawasan Kemayoran.

Sebagai kawasan percontohan ruang terbuka publik, dukungan Kementerian PUPR yang diharapkan adalah mengubah kualitas waduk Kemayoran yang tercemar sebagai cadangan air baku dan kolam retensi. Langkah yang dilakukan adalah dengan mengubah sistem sirkulasi air di kawasan Kemayoran yang sebelumnya

tercemar air limbah main drain kawasan kemayoran. Penanganan yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah dengan membangun IPAL di *inlet* Danau Kemayoran agar kualitas air danau menjadi lebih baik dan mengurangi potensi endapan di badan danau.

Selain itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga dapat memberikan dukungan melalui pembangunan SPAM untuk mengurangi *backlog supply* air minum kawasan kemayoran yang dikembangkan sebagai pusat permukiman vertikal berskala besar. Membaiknya kondisi lingkungan juga dapat mendorong fungsi kawasan untuk dapat dikembangkan sebagai area rekreasi melalui pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang terdiri dari area rekreasi, taman kota, jalur sepeda, dan *jogging track*.

Untuk menjaga kualitas air danau, peran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sangat penting mengingat wilayah Kemayoran memiliki risiko banjir tahunan dengan potensi debit yang masuk ke Danau Kemayoran pada periode Q10 = 16,53 m<sup>3</sup>/dt dan Q25 = 18m<sup>3</sup>/dt, dimana kapasitas rencana IPAL = 2x5.000 m<sup>3</sup>/hari. Kelebihan debit yang dapat terjadi perlu diantisipasi baik melalui peningkatan kapasitas Danau Kemayoran maupun pengembangan sistem polder yang dapat mengalirkan

kelebihan volume air ke Laut melalui Kali Sentiong. Penanganan banjir kemayoran sebagai bagian dari Polder Sentiong sedang ditangani oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui pembangunan Pompa Ancol Sentiong yang akan selesai pembangunannya pada tahun 2023.

Sebagai upaya menterpadukan pembangunan infrastruktur PUPR di RTP Kemayoran, Kepala BPIW dalam rapat koordinasi yang mengadirkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta Pusat Pengelola Kawasan Kemayoran telah menyepakati *timeline* pengembangan RTP Kemayoran, dimana kegiatan konstruksi agar dimulai pada TA 2022 dan selesai pada TA 2023. Penanganan didahului oleh pembangunan IPAL untuk memperbaiki kualitas air danau pada tahun 2022, yang dilanjutkan oleh pembangunan SPAM, penataan RTH, serta pengendalian banjir dan pengerukan danau pada tahun 2023.

Pengembangan RTP Kemayoran dapat menjadi momentum bagi BPIW untuk menjadi integrator program antar sektor dalam skala kawasan serta menjadi percontohan bagi pengembangan ruang terbuka publik yang memiliki fungsi ekologis, sosial, pengendali banjir, serta pembentuk identitas kota. (\*\*)



### Ulasan

#### Raymond Tirtoadi, S.E., M.A.

Penata Ruang Ahli Muda Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II



Sumber: Kompu BPIW

[bpiw.pu.go.id](http://bpiw.pu.go.id)

## BPIW Bahas *Draft* MoU dengan PT.PII

BPIW Kementerian PUPR akan melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT.PII) dalam waktu dekat. Nota kesepahaman ini terkait kolaborasi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR melalui skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Guna mempersiapkan MoU tersebut, dilakukan Rapat Pembahasan Lanjutan Draft MoU pada 2 Maret 2022 melalui virtual.

Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto mengatakan tujuan dilaksanakannya rapat tersebut adalah untuk menajamkan persepsi terkait ruang lingkup, pelaksanaan, dan bentuk kerja sama antara BPIW dengan PT.PII. (\*\*)



### Ulusan **Angger Hasanah**

Subkor Pelaksana Tugas Kerja Sama,  
Bagian Hukum, Kerja Sama dan  
Komunikasi Publik Sekretariat BPIW

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR bersama PT.Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) berencana untuk menginisiasi *Memorandum of Understanding* (MoU) Kolaborasi Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR Berbasis Pendekatan Pengembangan Wilayah. Lingkup MoU ini meliputi pengembangan kapasitas, pelatihan, serta *knowledge sharing* guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR berbasis pendekatan pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan resiko penjaminan pembiayaan infrastruktur.

Rencana inisiasi kesepahaman bersama ini dilakukan dalam rangka mendorong inovasi kreatif proyeksi pembiayaan infrastruktur guna menekan penggunaan APBN/APBD. Berdasarkan proyeksi kemampuan APBN 2020-2024, diperkirakan APBN hanya mampu memenuhi 30 persen, atau sekitar Rp 623 Triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 Triliun. Untuk menutupi *gap* sebesar 70

persen, Kementerian PUPR menyiapkan beberapa kebijakan yakni pelibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur khususya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang berfungsi sebagai integrator pembangunan infrastruktur PUPR, serta menyusun perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR. Dalam hal ini, BPIW menyusun produk perencanaan pengembangan wilayah yang muatannya antara lain adalah skenario pengembangan wilayah, analisa kebutuhan infrastruktur, berikut rencana aksi pembangunan infrastruktur. Dari muatan produk perencanaan ini dapat terlihat proyeksi pengembangan infrastruktur wilayah yang berkaitan erat dengan kebutuhan kajian terkait skema pembiayaan yang kemudian akan diaplikasikan menjadi program infrastruktur PUPR yang akan dibangun oleh unit organisasi di PUPR. Dalam memenuhi tugas dan fungsi tersebut, kompetensi dan sumber daya manusia di BPIW perlu

ditingkatkan dengan pemahaman konsep dasar skema *creative financing* khususnya skema KPBU sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan produk perencanaan dan pemrograman serta *best practice* yang telah dilakukan selama ini oleh para praktisi. Sejalan dengan hal ini, BPIW bekerja sama dengan PT.PII yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Kementerian Keuangan, selaku penjamin risiko proyek infrastruktur pemerintah.

Kerja sama yang akan dilakukan nanti diharapkan bersifat timbal balik antara BPIW dengan PT.PII, yaitu pegawai BPIW mendapatkan peningkatan pemahaman tentang konsep dasar penerapan skema KPBU untuk masukan dalam penyusunan program serta penerapan pelaksanaan penjaminan proyek infrastruktur yang dilakukan oleh PT.PII. Sebaliknya PT.PII diharapkan mendapatkan peningkatan pemahaman tentang prinsip dan proses perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah yang dihasilkan BPIW. (\*\*)

## Rapermen Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Masuki Tahap Harmonisasi

BPIW Kementerian PUPR sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR. Penyusunan Rapermen ini telah memasuki tahap harmonisasi dan pembahasannya dilakukan secara *hybrid* di Serpong Tangerang Selatan, Selasa, 15 Maret 2022.

Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk menyepakati Rapermen yang dilakukan bersama Kementerian Hukum dan HAM, dan juga Kementerian PPN/Bappenas pada akhir tahun lalu. "Peraturan Menteri ini disusun untuk dapat mengakomodir seluruh proses perencanaan dan pemrograman di BPIW. Terkait hal itu, maka Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) menjadi acuan pemrograman dalam menyusun rencana kerja tahunan PUPR," ujar Iwan. (\*\*)

BPIW Kementerian PUPR tengah melaksanakan harmonisasi rancangan Rapermen tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR.

Penyusunan Rapermen ini dilatarbelakangi pertimbangan untuk memperkuat bisnis proses perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR (tahapan, proses, serta muatan) serta adanya panduan untuk mengatur pembagian peran dalam pelaksanaan perencanaan dan pemrograman di lingkungan Kementerian PUPR.

Rapermen ini tidak mengatur internal unor, tapi membahas hubungan tugas antar unor. Tujuannya tak lain agar proses

perencanaan dan pemrograman yang dilakukan dapat berjalan dengan harmonis.

Ruang lingkup muatan Rapermen meliputi pengaturan terkait:

- Perencanaan meliputi Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW);
- Pemrograman meliputi pelaksanaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil); pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg); Penyusunan Renja Kementerian PUPR;
- Pengelolaan data dan informasi perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.



Sumber: Kompu BPIW



### Ulasan

#### Rahindro, S.Sos, M.Eng

Sub Koordinator Pelaksana Tugas Hukum, Bagian Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Sekretariat BPIW

Penyusunan Rapermen ini juga bertujuan agar proses perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui pendekatan pengembangan wilayah dengan prosedur yang baku dan standar. Sebab, hadirnya Rapermen sangat penting untuk menjaga keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR. (\*\*)

Rayakan hari yang fitri  
dengan hati yang suci



Keluarga BPIW mengucapkan

**Selamat Hari Raya  
Idul Fitri**

**1443 H**

**Mohon Maaf Lahir dan Batin**

Taqabbalallahu minna wa minkum,  
shiyamana wa shiyamakum. Semoga  
Allah menerima puasa kita semua,  
Aamiin..

# KUIS

**Kuiz Edisi 57 Maret-April 2022**

**Apa nama bendungan untuk mendukung kebutuhan air baku dan pengendalian banjir di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur ?**

- a. Bendungan Bener**
- b. Bendungan Napun Gete**
- c. Bendungan Tapin**
- d. Bendungan Sepaku Semoi**

**Jawaban Kuis Edisi 56 Januari-Februari 2022**

- a. 17 – 22 Februari 2022**

**Pemenang Kuis Edisi 56 Januari-Februari 2021**  
**Pranto Leksono - Bekasi**  
**Agung Raditya - Depok**

Dua orang pemenang akan mendapatkan souvenir menarik dari BPIW. Jawaban disampaikan melalui email : [hkkompu.bpiw@pu.go.id](mailto:hkkompu.bpiw@pu.go.id) Jawaban juga dapat disampaikan melalui WhatsApp No: 0838-0874-7276 paling lambat tanggal 31 Mei 2022 disertakan scan KTP, nomor kontak, dan alamat pengiriman souvenir. Jawaban dan nama pemenang akan diumumkan pada edisi 58, Mei-Juni 2022

## Review

# Kota Inklusif, Kota Untuk Semua

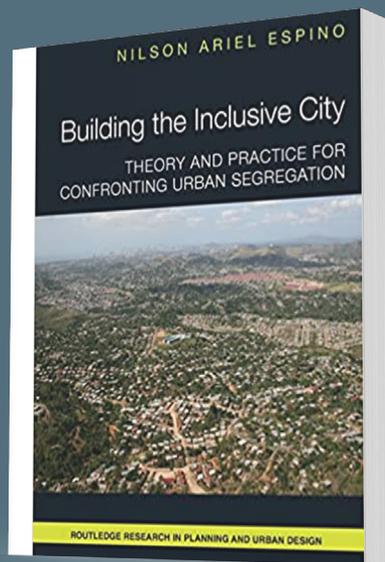
Judul Buku	: <i>Building the Inclusive City: Theory and Practice for Confronting Urban Segregation</i>
Pengarang	: Nilson Ariel Espino
Penerbit	: Routledge
Tempat Terbit	: London-United Kingdom
Tahun Terbit	: 2015
ISBN	: 978-1-138-08866-5

Buku ini berisi penjelasan tentang sifat-sifat eksklusif kota kontemporer dan menawarkan ide-ide bagaimana menggesernya ke paradigma kota yang lebih inklusif. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak kota di dunia saat ini dibangun secara eksklusif.

Hal ini terjadi karena adanya respon terhadap ekonomi global, sehingga perkotaan cenderung dibangun untuk tujuan proyek, menarik investor, penduduk, pelanggan, dan wisatawan yang mampu menaikkan nilai ekonomi. Bentuknya bisa seperti pembangunan gedung-gedung komersil, proyek perumahan elit, kompleks olahraga, hingga ruang-ruang terbuka publik.

Akibatnya lanskap perkotaan cenderung elitis dan menyingkirkan penduduk miskin kota. Penduduk miskin terpisah secara geografis. Mereka tinggal di area yang jauh terpinggirkan, terisolasi, dan tidak sehat. Hal ini memicu diskriminasi dalam berbagai dimensi kehidupan perkotaan. Penduduk miskin harus menanggung waktu tempuh yang lebih lama, layanan publik yang minim, isolasi sosial, kekerasan lingkungan, hingga kurangnya kesempatan usaha atau bekerja.

Pola peminggiran penduduk miskin terlihat mencolok, bahkan terkadang melampaui budaya lokal atau sistem politik. Pada saat Afrika Utara menyiapkan FIFA *World Cup* 2012, kaum miskin dipindahkan dari sepanjang jalan menuju stadium, begitu juga warung-warung digusur dari sekitar fasilitas olahraga dan area wisatawan. Rio De Janeiro pun melakukan hal yang sama ketika menjadi tuan rumah *World Cup* 2014, dan Olimpiade 2016. Namun event kelas dunia bukan satu-satunya. Di Beijing, juga terjadi penggusuran pusat lingkungan tradisional yang selama berabad-abad telah menjadi rumah bagi beragam keluarga dan industri kecil, digantikan dengan mall, hotel, dan gedung-gedung perkantoran.



UN Habitat menyebut istilah "*inclusive cities*" untuk mendeskripsikan tipe pembangunan yang menjamin kesetaraan untuk penduduknya dalam empat dimensi, yaitu: dimensi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Namun penulis berpendapat bahwa istilah-istilah tersebut adalah istilah yang ambisius. Penulis berusaha untuk menggunakan istilah "*inclusive*" pada pemahaman terbatas. Inklusif di sini akan selalu memiliki dimensi spasial dan akan selalu bertentangan dengan segregasi kota. Inklusif merujuk pada kebutuhan pada perencanaan dan desain kota sehingga tidak merugikan, mengisolasi, bahkan memarginalkan kelompok-kelompok rentan.

Buku ini dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama lebih teoritis, cenderung ingin menjelaskan bagaimana kekuatan sosial berpengaruh dalam lingkungan kita saat ini, dan bagaimana ruang perkotaan meresponnya. Bagian pertama diawali dengan pemaparan konsep dasar ilmu sosial yang menjelaskan hubungan antara ruang perkotaan dan kekuatan sosial.

Sedangkan bagian kedua lebih praktis, dan lebih menjawab tantangan tentang bagaimana membuat kota yang lebih inklusif. Pemaparan digambarkan secara teori dan memberikan contoh kebijakan publik yang telah digunakan di beberapa negara di dunia.

Penyajian contoh dan pengalaman di beberapa wilayah ditujukan untuk menyediakan konsep yang luas tentang masalah dan solusinya, sehingga pembaca diharapkan terbantu mengevaluasi kondisi saat ini dan menemukan solusinya.

(Mutri Batul Aini)



# Manajemen Risiko dalam Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Oleh :

**Neneng Chairiah**

Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW.

**Tri Handoyo**

Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW.

Dinamika lingkungan strategis menyebabkan ketidakpastian menjadi suatu hal yang perlu diantisipasi oleh setiap organisasi. Respon terhadap lingkungan strategis tersebut, tidak cukup hanya dengan kegiatan adaptasi, namun juga perlu mitigasi atas potensi perubahan. Khususnya perubahan yang berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Risiko adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dan ditimbulkan dari ketidakpastian, serta dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Manajemen risiko merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Oleh sebab itu, dalam rangka memastikan tercapainya tujuan dan sasaran organisasi perlu dilaksanakan manajemen risiko. Risiko adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dan ditimbulkan dari ketidakpastian, serta dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Manajemen risiko merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang

prosesnya terdiri dari:

- Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, program/kegiatan;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Prioritisasi risiko;
- Respon/mitigasi risiko;
- Monitoring dan evaluasi.

Adapun beberapa manfaat dari penerapan manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 antara lain:

- Terwujudnya sinergi antara strategi organisasi dengan tingkat risiko yang dapat diterima (*risk appetite*) untuk mencapai tujuan organisasi;
- Adanya peringatan dini terhadap potensi risiko yang berpotensi menjadi permasalahan serius;
- Mendorong manajemen yang pro-aktif karena tersedianya informasi yang baik sebagai dasar pengambilan keputusan;
- Membantu penggunaan sumber daya untuk penanganan risiko secara efektif dan efisien;

- Meningkatkan ketahanan organisasi terhadap kondisi eksternal; dan
- Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

## Dasar Hukum Manajemen Risiko di Kementerian PUPR

Pelaksanaan manajemen risiko di Kementerian PUPR diamanatkan oleh Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR dimana setiap Unit Organisasi dilengkapi Unit Kepatuhan Intern yang salah satu fungsinya melaksanakan manajemen risiko di masing-masing Unit Organisasinya. Selain itu, penerapan manajemen risiko juga diatur melalui Surat Edaran (SE) Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR. Melalui surat edaran tersebut diatur prinsip dan

kerangka kerja manajemen risiko, infrastruktur manajemen risiko, dan proses manajemen risiko.

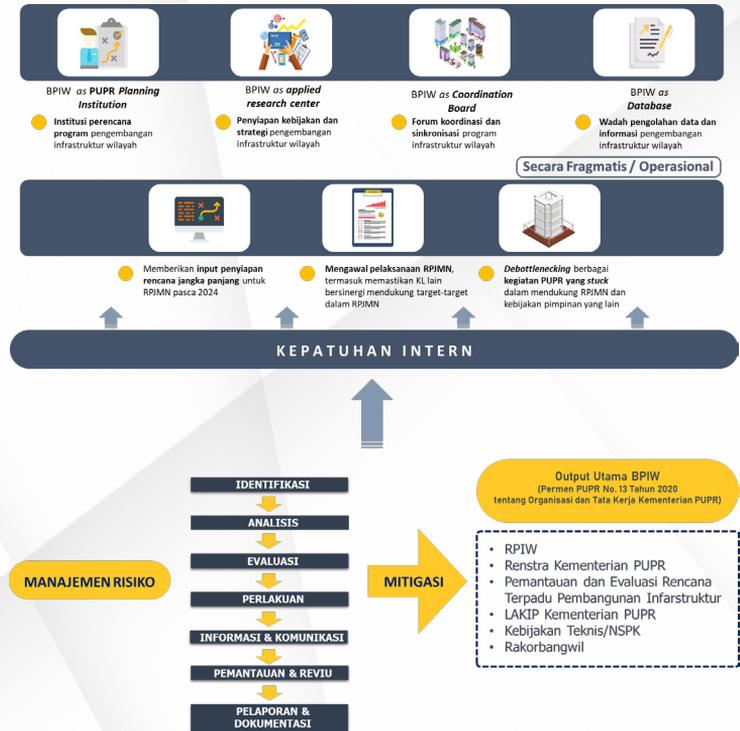
### Praktik Manajemen Risiko di BPIW

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPIW sebagai institusi yang *core business*-nya adalah perencanaan dan pemrograman berbasis pengembangan wilayah, manajemen risiko merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam menjamin kualitas perencanaan dan pemrograman yang tepat sasaran.

Sebagaimana gambar di atas, Bidang Kepatuhan Intern BPIW melaksanakan manajemen risiko terhadap beberapa lingkup pekerjaan utama BPIW, antara lain:

- 1) Perencanaan program pengembangan infrastruktur wilayah;
- 2) Penyiapan kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur wilayah;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi program infrastruktur wilayah;
- 4) Pengolahan data dan informasi pengembangan infrastruktur wilayah;
- 5) Memberikan input penyiapan rencana jangka panjang untuk RPJMN pasca 2024;
- 6) Mengawal pelaksanaan RPJMN; dan
- 7) *Debottlenecking* berbagai kegiatan PUPR yang stuck.

Manajemen risiko dilaksanakan agar keluaran utama BPIW yaitu Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), Rencana Strategis Kementerian PUPR, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR, LAKIP Kementerian PUPR, Kebijakan



Teknis/NSPK, dan Rakorbangwil dapat tersusun dan dilaksanakan sesuai harapan.

Berdasarkan SE Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR, proses manajemen risiko terdiri atas:

NO	SE Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2021
1	Komunikasi dan konsultasi;
2	Perumusan ruang lingkup, konteks, dan kriteria;
3	Penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko);
4	Respon risiko;
5	Pemantauan dan tinjauan;
6	Pencatatan dan pelaporan.

Proses tersebut kemudian dipraktikkan ke dalam beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Penyusunan komitmen manajemen risiko (identifikasi sasaran kegiatan, indikator sasaran, kegiatan utama yang mendukung capaian indikator sasaran, dan tujuan kegiatan utama);
- b) Identifikasi daftar pemangku kepentingan dan perannya;
- c) Penyusunan profil risiko (tujuan kegiatan utama, pernyataan risiko, kategori risiko, penyebab risiko, dampak risiko, nilai risiko, pengendalian risiko yang

Manajemen risiko dilaksanakan agar keluaran utama BPIW yaitu Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), Rencana Strategis Kementerian PUPR, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR, LAKIP Kementerian PUPR, Kebijakan Teknis/NSPK, dan Rakorbangwil dapat tersusun dan dilaksanakan sesuai harapan.

sudah ada, nilai risiko setelah pengendalian, prioritas risiko, respon risiko, inovasi pengendalian risiko, alokasi sumber daya, nilai risiko yang direspon, penanggung jawab, target waktu, dan indikator keluaran;

d) Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan unit pemilik risiko; dan  
e) Penyusunan peta risiko (matriks analisis risiko yang mengkaitkan tingkat kemungkinan terhadap tingkat dampak untuk melihat pergerakan risiko setelah direspon dari *inherent risk*, *controlled risk*, hingga risiko berada di bawah garis toleransi).

Di tingkat Unit Organisasi, BPIW dalam mengembangkan kawasan prioritas melalui penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR dihadapkan pada empat risiko, yaitu:

1) Penetapan target kawasan dalam Renstra belum selaras dengan sasaran kawasan K/L lain, sebagai akibat adanya agenda/sasaran K/L diluar target kawasan yang telah ditetapkan pada Renstra;  
2) Penyusunan dokumen rencana pengembangan infrastruktur

wilayah dilakukan secara berulang untuk lokus kawasan yang telah ditangani, karena penetapan kawasan yang ditangani belum sepenuhnya sesuai mengacu pada Renstra BPIW;

3) Pengalokasian anggaran dalam penyusunan dokumen rencana pengembangan infrastruktur wilayah belum optimal untuk memenuhi target Renstra akibat adanya *refocusing* anggaran untuk kebutuhan prioritas nasional; dan  
4) Penyusunan dokumen RPIW belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Muatan RPIW, sebab pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW belum sepenuhnya dilaksanakan.

Menindak lanjuti risiko tersebut, akan dikembangkan berbagai inovasi pengendalian, antara lain:

a) Pengendalian risiko 1: Penyesuaian target kawasan dalam Renstra (*midterm* reviu Renstra); b) Pengendalian risiko 2: Identifikasi kesesuaian dokumen RPIW yang telah disusun dengan Pedoman Muatan RPIW;  
c) Pengendalian risiko 3: Pemenuhan target kawasan Renstra melalui *Clustering* kawasan; dan d) Pengendalian risiko 4: *Quality Assurance* terhadap dokumen RPIW.

Sebagai penutup, manajemen risiko dalam perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur wilayah adalah hal penting, karena merupakan hulu dari pembangunan infrastruktur PUPR yang kualitasnya akan mempengaruhi efektivitas dari pembangunan infrastruktur PUPR. Perencanaan dan pemrograman

yang baik akan menjadikan dukungan infrastruktur PUPR tepat sesuai kebutuhan wilayah/kawasan baik dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. (\*\*)

Manajemen risiko dalam perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur wilayah adalah hal penting, karena merupakan hulu dari pembangunan infrastruktur PUPR yang kualitasnya akan mempengaruhi efektivitas dari pembangunan infrastruktur PUPR.

#### Daftar Pustaka

- Binsar H. Simanjuntak. 2021. *Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR*. Jakarta: *Workshop Manajemen Risiko BPIW*
- Ratih Kusmartiwi. 2021. *Fundamental Risk Management*. Jakarta: *Workshop Manajemen Risiko BPIW*
- Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR). 2020. *Scope of Enterprise Risk Management*. Jakarta: *Pelatihan CRMO*
- Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR*
- Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2021 tentang *Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR*



Salah satu bangunan yang menjadi icon di Kabupaten Kabupaten Kolaka  
Sumber : Ditjen Cipta Karya

# Perencanaan Kebun Raya Kolaka

Oleh :

**Hastuty, S.T., M.Eng**

Fungsional Umum Inspektorat  
Daerah Kabupaten Kolaka

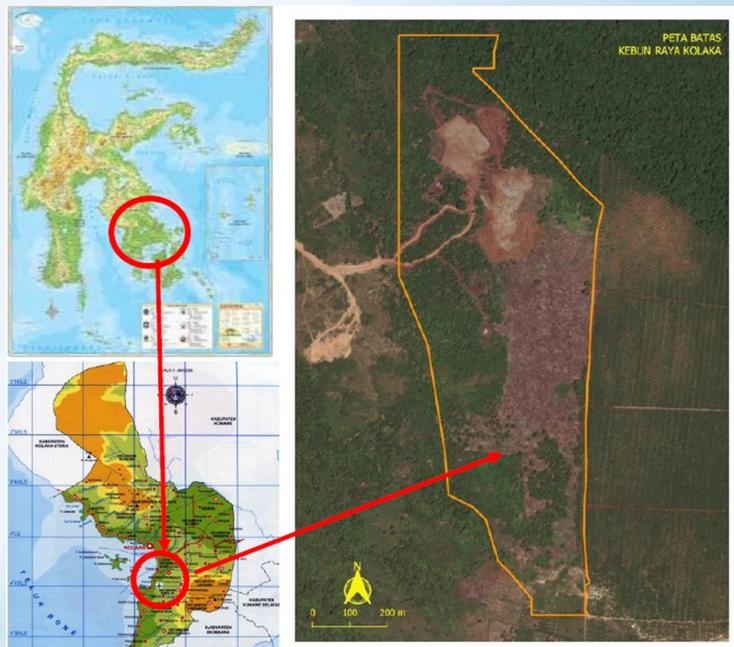
**Sri Asnita Nurdin, S.T., M.T.**

Perencana Ahli Muda Bappeda  
Kabupaten Kolaka

Atas dasar potensi tersebut, salah satu rencana yang akan dikembangkan adalah pembangunan Kebun Raya di Kabupaten Kolaka. Lokasi perencanaan Kebun Raya berada di Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas  $\pm 60$  ha.

Program pembangunan Kebun Raya Kolaka dirumuskan dengan mengacu pada kebijakan pembangunan nasional dan daerah tentang IPTEK dan lingkungan hidup, harapan pimpinan Pemerintah Daerah dan masyarakat, fungsi sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan

Kabupaten Kolaka terletak di bagian barat Sulawesi Tenggara dengan posisi memanjang dari utara ke selatan. Kabupaten Kolaka mencakup daratan dan kepulauan yang memiliki wilayah seluas 3.283,59 Km<sup>2</sup> dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas  $\pm 15.000$  Km<sup>2</sup>. Dengan luasan tersebut, Kabupaten Kolaka memiliki potensi sumber daya alam, antara lain pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, kehutanan, dan pertambangan. Khusus di sektor kehutanan, Kabupaten Kolaka memiliki kekayaan flora dan fauna termasuk beberapa jenis endemik di Kolaka.



Gambar 1. Peta Lokasi Calon Kebun Raya di Kabupaten Kolaka

Sumber : Dokumen Penulis

Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya yaitu konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan, serta kondisi lingkungan biotik dan abiotik di sekitarnya.

Dalam jangka panjang, pembangunan Kebun Raya Kolaka diharapkan mampu menjalankan fungsinya, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara skematis, rencana pengembangan Kebun Raya Kolaka dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.

Lahan calon Kebun Raya Kolaka secara hukum telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/161/2020 tentang Penetapan Lokasi Kebun Raya Kolaka seluas 60 hektar yang terletak di Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada. Pada awalnya, lahan ini merupakan Kawasan Hutan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 454/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas ± 2.600.137 Hektar.

Selanjutnya ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.465/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 110.105 Hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 115.111 Hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perubahan status pada tahun 2011 ini juga berkenaan dengan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Surat Nomor 640/4952 tanggal 17 November 2009 tentang Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

**Keanekaragaman Hayati**

Lokasi calon Kebun Raya Kabupaten Kolaka dahulu merupakan kawasan hutan alami primer (*primary forest*) dan berubah menjadi hutan sekunder karena adanya aktifitas tebang pilih (*selective logging*) karena statusnya sebagai hutan produksi.

“Pembangunan Kebun Raya Kolaka diharapkan mampu menjalankan fungsinya, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat”



Gambar 2. Arah Pengembangan Kebun Raya Kolaka  
Sumber : Dokumen Penulis



Gambar 3. Kondisi Vegetasi Eksisting pada areal calon Kebun Raya Kolaka. a) Hutan sekunder dengan pohon *Ficus kurzii*, b) semak belukar dengan tumbuhan pionir *Macaranga triloba*, c) area terbuka  
Sumber : Dokumen Penulis

“ Tema koleksi Kebun Raya adalah fokus utama pengkoleksian tumbuhan yang sesuai dengan ekoregion dan keunggulan yang menjadi ciri khas suatu Kebun Raya. ”

Lokasi calon kebun raya ini berbatasan langsung dengan hutan produksi yang berupa hutan sekunder dengan tutupan vegetasi yang cukup baik, kebun sawit, dan kebun masyarakat yang didominasi jambu mente dan cengkeh. Selain itu, lokasi calon kebun raya berdekatan dengan CA Lamedai yang mempunyai vegetasi hutan primer.

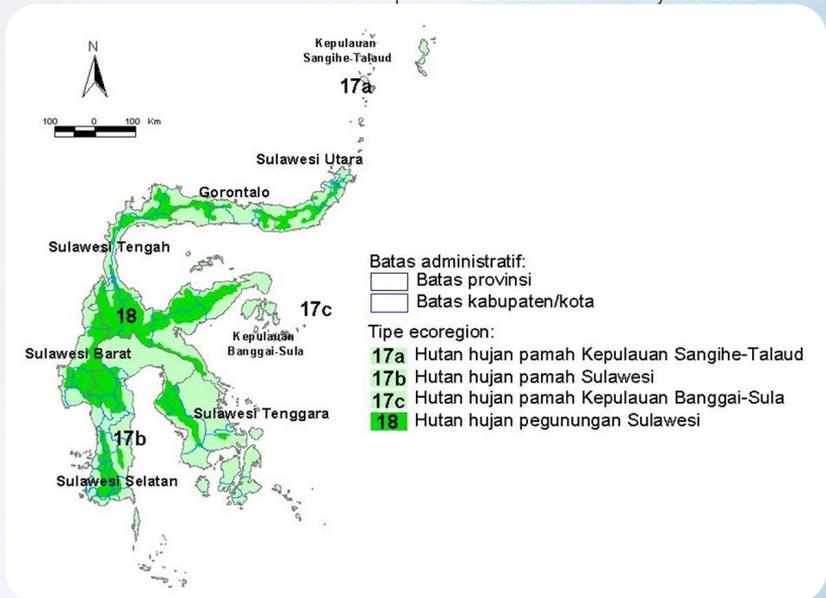
Saat ini, kondisi eksisting vegetasi di lokasi calon Kebun Raya Kolaka berupa kombinasi hutan sekunder, semak belukar, dan areal terbuka. Pada vegetasi hutan sekunder, beberapa pohon tinggi masih tersisa diantaranya jenis-jenis *Ficus* spp., *Cananga odorata*, *Dracontomelon dao*, *Artocarpus elasticus*, *Buchanania arborescens* dan lain sebagainya. Pada vegetasi semak belukar terdapat beberapa jenis tumbuhan pionir seperti *Macaranga gigantea*, *Macaranga triloba*, *Cananga odorata*, *Cleistanthus* sp., *Tabernaemontana* sp., *Croton* sp., *Pterospermum* sp., *Litsea* sp. dan lain sebagainya.

Vegetasi eksisting ini dapat dimanfaatkan sebagai koleksi spontan di Kebun Raya Kolaka dan juga berfungsi sebagai tumbuhan peneduh untuk bibit-bibit koleksi yang akan ditanam. Namun demikian, di beberapa titik pada vegetasi hutan sekunder dan semak belukar terjadi aktifitas pembukaan lahan. Pada areal terbuka, vegetasi yang tersisa sangat terbatas karena adanya kegiatan penambangan.

Selain jenis-jenis tersebut, ada satu jenis yang cukup unik dan menarik penampilannya yaitu *Caesalpinia latisiliqua*, yaitu suatu jenis dari suku polong-polongan (*Fabaceae*) yang dapat

dikenali dari bentuk perawakan (*habitus*) yang berupa semak menjalar (*climber shrub*), memiliki duri dan warna polongnya yang merah menyala. Keberadaan jenis-jenis yang cukup penting, berpotensi dan unik tersebut menjadi justifikasi untuk mempertahankan kondisi vegetasi yang tersisa seutuh mungkin untuk dijadikan koleksi spontan atau tumbuh secara in situ. Dengan demikian, perencanaan pembangunan infrastruktur, fasilitas dan utilitas di Kebun Raya Kolaka dapat diarahkan ke areal-areal yang terbuka minim vegetasi.

Karena vegetasi yang berada di lokasi calon Kebun Raya Kolaka merupakan vegetasi tersisa (hutan sekunder dan semak belukar), diperlukan data lain yang dapat memberi gambaran jenis-jenis yang diduga pernah hidup di waktu lampau ketika kondisi vegetasi masih utuh (hutan primer). Informasi ini penting sebagai acuan target jenis-jenis yang akan dieksplorasi dan dikoleksi di Kebun Raya Kolaka dengan harapan jenis-jenis tersebut mampu sintas (*survive*) sebagai koleksi kebun raya di masa datang. Dalam konteks Kebun Raya Kolaka, informasi jenis-jenis sebagai target eksplorasi dan koleksi tersebut dapat mengacu pada hasil inventarisasi tumbuhan yang terdapat di Cagar Alam Lamedai. Hal ini dikarenakan adanya kedekatan lokasi dan kemiripan ekosistem antara CA Lamedai dan lanskap di lokasi calon Kebun Raya Kolaka.



Gambar 4. Peta ekoregion Pulau Sulawesi dan sekitarnya (Olson et al 2001)  
 Sumber : Dokumen Penulis

Area pembibitan Kebun Raya Kolaka secara keseluruhan dapat menampung lebih dari 67 ribu bibit, area kompos dapat menampung lebih dari 4 ribu m<sup>3</sup> sampah organik.

Hasil analisis vegetasi tingkat pohon di Cagar Alam Lamedai (Santoso et al., 2009) menunjukkan secara total terdapat setidaknya 53 jenis pohon yang ditemukan pada plot pengamatan. Euphorbiaceae dan Myrtaceae merupakan suku paling dominan dengan masing-masing 7 jenis. Pohon Pasang (*Castanopsis buruana*) merupakan jenis paling dominan, disusul oleh *Metrosideros* sp., *Lophophetalum* sp., dan *Rhus taitensis*.

Pohon dengan nilai konservasi tinggi, yaitu Kayu Kuku (*Pericopsis mooniana*) dengan kelimpahan sekitar

Untuk tingkat tumbuhan bawah (*ground cover*), terdapat setidaknya 118 jenis yang ditemukan pada plot pengamatan dengan *Myrtaceae*, *Euphorbiaceae* dan *Rubiaceae* menjadi suku paling dominan, masing-masing dengan tujuh jenis. Seperti halnya pada tingkat anakan pohon, *Cleistanthus* sp. Menjadi jenis yang paling dominan, disusul oleh bambu rambat (*Dinochloa* sp.), *Psychotria* sp., dan *Zingiber* sp kemudian Kayu Kuku (*Pericopsis mooniana*).

Tema koleksi Kebun Raya adalah fokus utama pengkoleksian tumbuhan yang sesuai dengan ekoregion dan keunggulan yang menjadi ciri khas suatu Kebun Raya. Oleh karenanya, setiap Kebun Raya memiliki tema koleksi tumbuhan tertentu. Tema dipilih sebagai representasi jenis-jenis tumbuhan yang diprioritaskan untuk dikonservasi secara ex situ dan mencirikan kondisi lingkungan lingkungan setempat serta kondisi sosial budaya masyarakat. Berdasarkan peta Ekoregion Indonesia (Olson et al., 2001), lokasi tapak terletak pada wilayah ekoregion hutan hujan pamah Sulawesi (Gambar 4).

Tipe ekoregion di Sulawesi dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Ekoregion Hutan Hujan Dataran

Rendah Sulawesi dan Ekoregion Hutan Hujan Pegunungan Sulawesi (Olson et al., 2001; WWF, 2020). Keunikan ekosistem dan keanekaragaman hayati wilayah Sulawesi adalah posisinya pada Zona Wallacea yang berbeda dengan Zona Asia dan Australasia.

Beberapa keunikan karena faktor geologi dan mineral penyusun khusus di Sulawesi Tenggara adalah adanya ekosistem dataran rendah *ultrabasa (ultramafic)*. Daerah Kolaka dan sekitarnya (termasuk Kolaka Utara dan Kolaka Timur) merupakan salah satu kawasan penting di Sulawesi dengan kekhasan ekosistem



Gambar 5. Masterplan Kebun Raya Kolaka  
Sumber : Dokumen Penulis

11,5 individu per hektar. Untuk tingkat anakan pohon, terdapat setidaknya 76 jenis penyusun vegetasi dengan *Myrtaceae* menjadi suku paling dominan dengan 11 jenis, disusul oleh *Euphorbiaceae* dengan 8 jenis. *Cleistanthus* sp. menjadi jenis paling dominan, disusul oleh *Gnetum gnemon* (Melinjo), *Canthium glabrum*, dan *Canthium* sp. Berbeda dengan tingkat pohon, Kayu Kuku (*Pericopsis mooniana*) pada tingkat anakan pohon ini berada pada peringkat cukup rendah, yang mengindikasikan adanya masalah regenerasi.



*Sumbu Utama Tapak*

*Sumber : Dokumen Penulis*

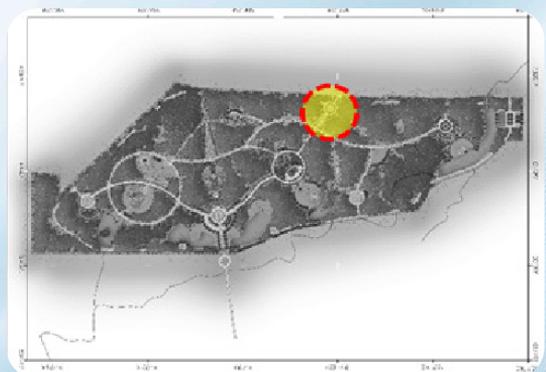
yang menyimpan keanekaragaman hayati tumbuhan yang sangat tinggi. Terdapat dua habitat utama flora di Kolaka dan sekitarnya yaitu di Kawasan Hutan Mekongga dan Cagar Alam Lamedai.

pengunjung dan pengelola, dapat menampung lima bus, 138 mobil dan 37 motor, namun pada prakteknya komposisi tersebut dapat diatur secara fleksibel sesuai perkembangan kebutuhan aktivitas dalam kebun raya.

Secara umum, Kebun Raya Kolaka mempunyai empat zona utama yaitu zona penerima (2,1 ha; 3,66 persen), zona pengelola (1,48 ha; 2,57 persen), zona koleksi (41,26 ha; 71,74 persen) dan zona wisata (3,95 ha; 6,87 persen). Luasan tersebut masih ditambah alokasi lahan untuk infrastruktur kebun raya seluas sekitar 8,76 ha (15,23 persen) dari total luasan tapak sekitar 57 hektar.

*Main signage* harus dapat memenuhi fungsinya sebagai penanda akan adanya kebun Raya Kolaka, karena Kebun Raya yang direncanakan tidak terletak di jalan poros yang sering dilalui oleh kendaraan pada umumnya. Posisi *Main signage* terletak di jalan poros *Pomalaa-Boepinang* tepatnya terletak diperempatan menuju Kebun Raya Kolaka.

Agar dapat berfungsi optimal pengelolaannya harus memperhitungkan daya dukung tapak. Kondisi ideal, kebun raya maksimal mampu menampung sekitar 18 ribu orang beraktivitas di dalam tapak. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan standar kebutuhan ruang dalam *De Chiara, J. & Koppelman L. E. (1997)* dan *Neufert (2002)* dengan penyesuaian terutama pada kebutuhan ruang wisata *outdoor* hanya setengah dari kebutuhan aktivitas standar yaitu 10 m<sup>2</sup>/orang.



*Camping Ground*

*Sumber : Dokumen Penulis*

Area pembibitan Kebun Raya Kolaka secara keseluruhan dapat menampung lebih dari 67 ribu bibit, area kompos dapat menampung lebih dari 4 ribu m<sup>3</sup> sampah organik. Area parkir total, baik untuk kendaraan

Perencanaan *camping ground* atau bumi perkemahan di Kebun Raya Kolaka mengikuti kaidah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 24 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Bumi Perkemahan. Penggunaan fasilitas ini hanya diarahkan bagi kegiatan perkemahan skala besar sekelas Kabupaten, namun pada perkembangannya dapat disarankan untuk dibuka bagi masyarakat umum secara individual setelah semua fasilitas dan sumber daya operasional kebun raya terpenuhi.

Luas alokasi area bumi perkemahan direncanakan sesuai standar minimum yaitu 2,5 hektar, dengan kebutuhan ruang 120 m<sup>2</sup>/regu sehingga daya dukung maksimum menampung 1.250 orang. Karena sifat kegiatan perkemahan yang temporer, semua sarana pendukung diarahkan menginduk kepada fasilitas standar kebun raya dengan akomodasi fungsi yang sesuai. Lokasi *camping ground* direncanakan di bawah tegakan pohon pada area sekitar gerbang sekunder.

Sebagai jaminan keberlanjutan pengelolaan Kebun Raya Kolaka, Pemerintah Kabupaten Kolaka perlu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Kebun Raya



*Camping Ground*  
Sumber : Dokumen Penulis

dan pengelolaannya. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagai pengelola kebun raya mengikuti peraturan yang berlaku sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bila Unit Pelaksana Teknis berada di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka perlu mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.74/ Menlhk/ Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

Mengacu pada struktur organisasi di Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya yang sudah ada, struktur dasar lembaga pengelola kebun raya di Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Kebun Raya (setingkat eselon IVb) yang dibantu oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha. Selain menjalankan tugas administrasi, Kepala UPT Kebun Raya juga mengkoordinir pelaksanaan fungsi konservasi ex situ yang meliputi Pemeliharaan Koleksi, Registrasi Koleksi dan Pembibitan. (\*\*)



*Camping Ground*  
Sumber : Dokumen Penulis

# Mengatur Finansial Tetap Stabil Usai Libur Panjang

Libur panjang selalu menjadi momen yang menyenangkan, tapi juga menyebalkan. Pasalnya, setelah liburan usai keuangan menjadi mulai kacau. Sebab, selama liburan pengeluaran akan semakin membengkak. Terutama jika banyak belanja kebutuhan untuk mengisi waktu liburan. Tanpa sadar, maka pengeluaran jauh lebih besar dari sebelumnya. Agar finansial kembali normal, harus mengetahui cara mengatur keuangannya, berikut kiat-kiat agar finansial dapat stabil kembali.



Sumber : unsplash.com



Sumber : unsplash.com

## Mulailah Menabung dan Stop Berhutang

Anda harus memprioritaskan untuk membayar cicilan. Setiap menerima penghasilan atau gaji, langsung digunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jangan menunggu dari sisa gaji. Saat Anda masih memiliki hutang, jangan menambah hutang yang baru, misalnya membeli barang pakai kartu kredit lagi. Batasi pemakaian kartu kredit sebesar maksimal 30% dari penghasilan. Kalau perlu stop berhutang sampai hutang yang lama sudah lunas, sehingga beban finansial Anda tidak semakin berat. Setelah itu yang harus dilakukan adalah cobalah untuk mulai menabung. Cobalah menghilangkan anggaran untuk sesuatu yang masih bisa ditunda. Pangkas juga anggaran nongkrong, jalan-jalan. Intinya adalah Anda harus bisa kembali hidup hemat. Langkah tersebut dijamin bikin finansial stabil kembali.

## Menghitung Pengeluaran, Kembali Hidup Hemat

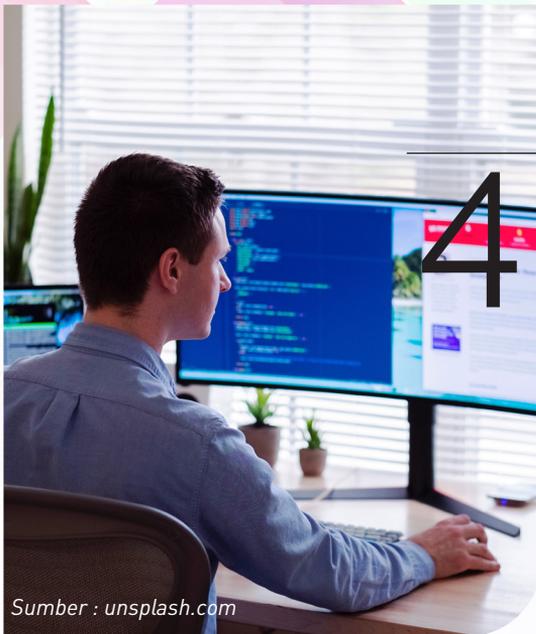
Setelah seluruhnya sudah dihitung, langkah selanjutnya yakni mengatur ulang anggaran. Utamakan dari penghasilan atau gaji digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit. Hilangkan anggaran untuk sesuatu yang masih bisa ditunda. Pangkas juga anggaran nongkrong, jalan-jalan. Intinya adalah harus bisa kembali hidup hemat. Langkah tersebut dijamin bikin keuangan stabil kembali. Menghitung pengeluaran itu memang harus dilakukan, sebab Anda akan mengetahui berapa banyak uang yang telah dikeluarkan, dan harus Anda kumpulkan kembali.



Sumber : unsplash.com

### Belajar dari Kesalahan

Anda dapat belajar dari kesalahan sewaktu berlibur kemarin. Mengeluarkan budget besar untuk apa saja. Misalnya untuk makan, maka Anda harus berpikir kembali ketika berlibur lagi. Pilihlah rumah makan yang menyajikan makanan dengan harga terjangkau atau murah. Sehingga tidak akan mengambil budget besar hanya untuk makan saja. Secara keseluruhan Anda bisa belajar berhemat saat *traveling*. Jangan sampai terbawa hawa nafsu belanja segala macam tanpa melihat kondisi keuangan. Jika sudah tahu akibatnya finansial akan berantakan setelah liburan, lebih baik tahan keinginan dan utamakan kebutuhan.



Sumber : unsplash.com

### Disiplin dan Komitmen

Cara mengatur finansial selanjutnya adalah dengan cara disiplin dan komitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat Anda boros. Jika sudah menentukan seperti itu, maka mulailah disiplin untuk tidak tertarik mengutang hal-hal yang tidak perlu. Komitmen untuk tidak belanja, foya-foya dan mengeluarkan uang seenaknya. Mulailah konsisten menyisihkan uang untuk investasi, tabungan, asuransi dan belanja-belanja kebutuhan produktif yang bermanfaat bagi masa depan. Lakukanlah perubahan finansial ini jika ingin, mengatur keuangan menjadi lebih stabil dan normal kembali. (\*\*)



Sumber : unsplash.com

### Cari Penghasilan Tambahan

Jangan bingung ketika selesai liburan keuangan semakin menipis. Anda hanya perlu mengaturnya kembali, tutuplah kekurangan keuangan dengan mencari penghasilan tambahan. Namun hal yang harus diperhatikan saat mencari penghasilan tambahan adalah manajemen waktu. Jangan sampai pekerjaan sampingan mengganggu pekerjaan utama. Akibatnya nanti semua pekerjaan jadi berantakan. Carilah pekerjaan sampingan yang bisa dikerjakan sepulang kerja. Dengan begitu pekerjaan utama di kantor tidak terbengkalai dengan pekerjaan sampingan.



Sumber : unsplash.com

# BIDIK LENSA

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR terpadu dalam pengembangan suatu kawasan dan wilayah di Tanah Air.

Program yang disiapkan antara lain pembangunan jalan nasional, rehabilitasi jalan, pembangunan jembatan, pembangunan sarana dan prasarana penunjang, pembangunan rumah khusus serta pemenuhan pelayanan dasar infrastruktur permukiman.

Pada edisi ini rubrik Bidik Lensa memotret hasil survey rencana penanganan kemiskinan ekstrem 2022. Kebijakan Kementerian PUPR pada tahun 2022 terkait upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah melakukan kolaborasi Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) dari Direktorat Jenderal Perumahan.

Program IBM merupakan program penyediaan infrastruktur dasar meliputi air bersih, sanitasi, limbah, dan infrastruktur permukiman yang menekankan partisipasi masyarakat. Program tersebut meliputi Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).

Adapun Program BSPS yakni bantuan pemerintah bagi warga untuk mendorong dan meningkatkan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya. Menurutnya, saat ini ada dua bentuk BSPS, yaitu Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS), dimana untuk penanganan miskin ekstrem akan difokuskan pada Peningkatan PKRS. Berikut beberapa daerah yang sudah dilakukan survei lapangan. (\*\*)



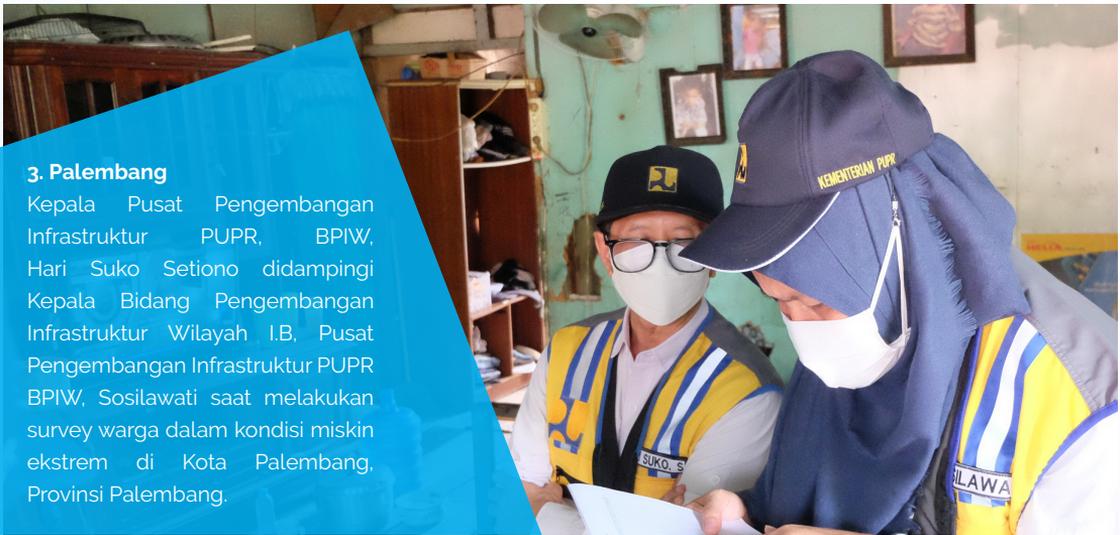
## 1. Riau

Salah satu rumah warga di Beting, Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau yang akan mendapat sentuhan penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2022.



## 2. Sumatera Utara

Rumah warga di Sei Lunang, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara menjadi sasaran penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2022.



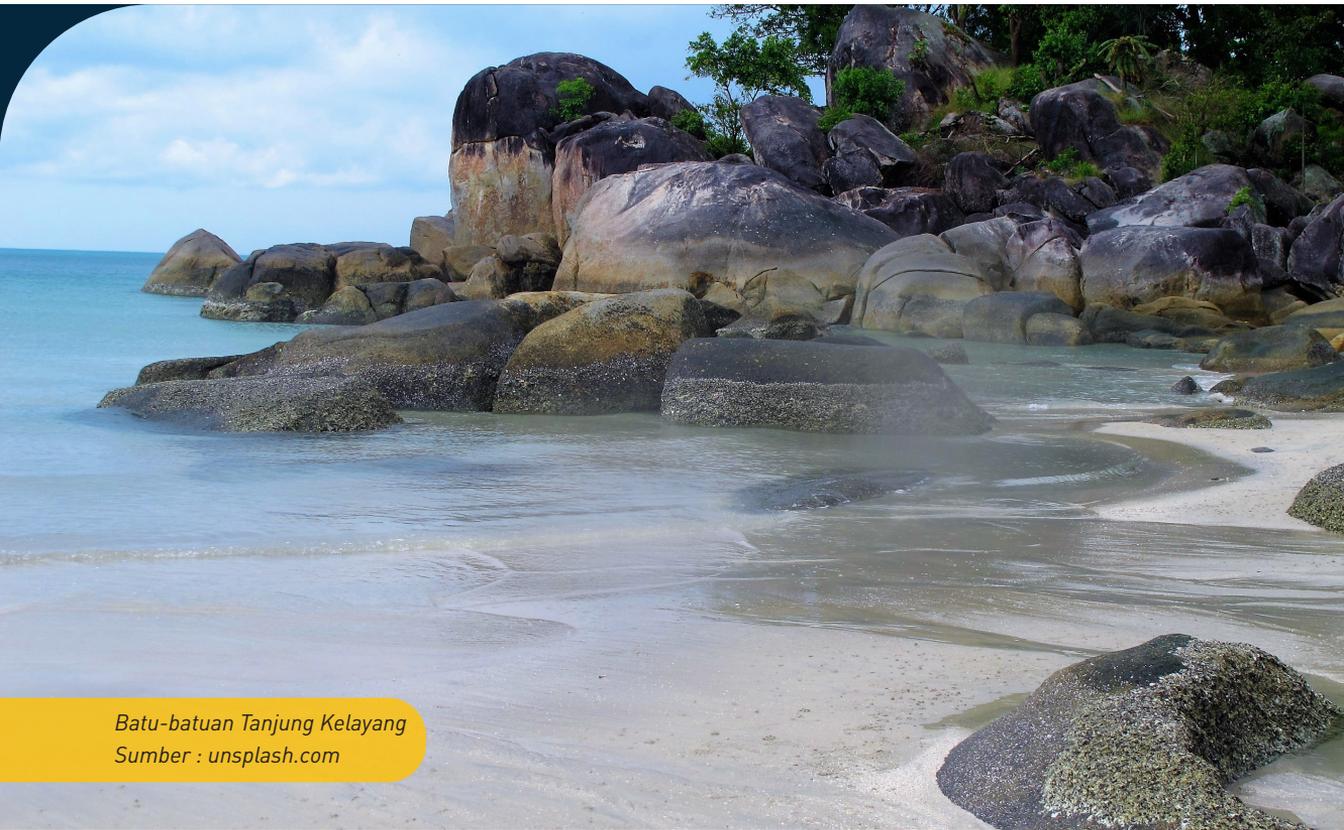
## 3. Palembang

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR, BPIW, Hari Suko Setiono didampingi Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR BPIW, Sosilawati saat melakukan survey warga dalam kondisi miskin ekstrem di Kota Palembang, Provinsi Palembang.



## 4. Maluku

Rumah warga di Kecamatan Dullah, Kota Tual, Provinsi Maluku yang didata akan menjadi penerima bantuan dari pemerintah dalam penanganan miskin ekstrem 2022.



Batu-batuan Tanjung Kelayang  
Sumber : [unsplash.com](https://unsplash.com)

# Pesona Alam nan Indah di Tanjung Kelayang

Tanjung Kelayang yang berada di Provinsi Bangka Belitung merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan juga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), punya pesona keindahan yang sangat lengkap dan mengagumkan. Tanjung Kelayang memiliki pantai yang memiliki panorama terindah dari Pulau Belitung. Pantai ini biasanya setiap tahun menjadi tempat singgah kapal-kapal *Yacht* yang mengikuti *Rally Sail Indonesia*.



Batu-batuan Tanjung Kelayang  
Sumber : [unsplash.com](https://unsplash.com)

Kawasan wisata pantai ini juga telah ditetapkan sebagai zona pengembangan ekonomi wisata khusus oleh pemerintah pusat. Sejumlah *event* pariwisata lokal, nasional bahkan internasional sering digelar di kawasan pantai yang jadi ikon wisata Belitung ini. Berbagai fasilitas publik juga sangat lengkap dan memadai di tempat ini. Area parkir tepi pantai Tanjung Kelayang juga sangat luas dan bersih.

Bila dari Jakarta, untuk menuju kawasan wisata tersebut ditempuh dengan menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Depati Amir Pangkal Pinang dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 10 menit. Dari Depati Amir ini banyak mobil travel yang menuju ke Tanjung Kelayang dengan dengan tarif Rp 60 ribu hingga Rp 100 ribu. Namun bisa ditempuh dengan angkutan kota (angkot) dan taksi.

Begitu Anda tiba dan menjejakkan kaki di Pantai Tanjung Kelayang, anda langsung disambut dengan tulisan 'Welcome To Belitung' berukuran raksasa. Papan nama sering diburu wisatawan untuk latar belakang foto selfie mereka, sebagai tanda bahwa mereka sudah pernah liburan ke Belitung. Pantai Tanjung Kelayang memiliki laut yang berair biru kehijauan, bergelombang tenang dengan pasir pantai yang putih dan halus. Karena itu, pantai ini juga menjadi tempat berenang yang menyenangkan dan cukup aman.

Di sisi pantai juga banyak terdapat pohon kelapa. Pemandangan paling menarik dari pantai ini adalah gugusan pulau-pulau kecil yang terbentuk dari batu-batuan granit besar yang berada 300 meter dari ujung pantai. Salah satu batu yang berbentuk kepala seekor burung yang menjadikan nama tempat ini menjadi pantai Kalayang, dimana Kalayang merupakan salah satu jenis burung yang berada di Pulau Belitung. Penduduk sekitar menamakan batu tersebut dengan nama istimewa yaitu "Batu Garuda".

Selain memiliki fasilitas publik yang lengkap, bersih dan terawat dengan baik. Pantai ini juga memiliki sebuah dermaga kecil yang masih berfungsi dengan baik. Anda juga sebuah aula besar tempat berteduh dan sering dijadikan tempat untuk pelaksanaan *event* tertentu.

Di pantai inilah banyak terdapat perahu nelayan (*traditional boat*) yang selain digunakan untuk mencari

ikan, juga dapat disewa untuk membawa wisatawan melakukan "Island Hopping" menuju Pulau Lengkuas, dan beberapa pulau eksotik lainnya diperaian laut Belitung. Anda bisa menikmati Pantai Tanjung Kelayang dengan berjalan kaki dari ujung ke ujung. Pantai berpasir putih sangat nyaman untuk berjalan-jalan santai.

Garis pantai yang memanjang, memungkinkan Anda untuk menikmatinya secara utuh. Dan yang paling sensasional tentu saja saat momen matahari tenggelam alias *sunset*. Menikmati keindahan Pantai Tanjung Kelayang, Anda akan dibawa melayang karena kecantikannya yang sulit anda temukan di daerah lain di Indonesia. **(Hen/berbagai sumber)**



Batu-batuan Tanjung Kelayang

Sumber : [tripcetera.com](http://tripcetera.com)

# Yuk, ikuti langkah ini

**untuk mendapatkan data mengenai pengembangan wilayah**



## 1 SIAPKAN

- Mengisi *form* permohonan informasi (*form* dapat di *download* di <http://bpiw.pu.go.id/contact>).
- Fotokopi identitas (SIM/KTP).
- Harus menyertakan Surat pengantar instansi yang menyatakan keperluan permohonan data.



## 2 AJUKAN

Ajukan berkas permohonan pada jam kerja (08.00-16.30) ke salah satu dari **channel** berikut:

- Booth* layanan informasi BPIW di Lobby Gedung G BPIW (kepada petugas jaga atau melalui kotak saran dan pengaduan).
- Website* BPIW: (<http://bpiw.pu.go.id/contact>).
- Email: [hkkompu.bpiw@pu.go.id](mailto:hkkompu.bpiw@pu.go.id)
- Whatsapp: **0838-0874-7276**.
- Stand* layanan informasi di acara atau pameran BPIW.

## 3 TUNGGU

**Tunggu selama permohonan Anda diproses :**

- Verifikasi informasi publik/ informasi dikecualikan (untuk permohonan informasi).
- Proses pengumpulan informasi paling lambat 10 hari dan dapat diperpanjang selama 7 hari dengan pemberitahuan.
- Proses tidak dipungut biaya.



## 4 TERIMA

- Pemohon menerima jawaban dari Bagian Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik BPIW.
- Puas - selesai .
- Tidak puas - pemohon dapat mengajukan keberatan yang diajukan kepada *channel-channel* di atas.

**Hubungi kami :**

# Selamat Hari Raya **PASKAH**

17 April 2022





## Kepemimpinan Jadi Kunci Keberhasilan Peningkatan IKPA

Ulasan

**Shovich S.A.P., M.A.P.**

Kepala Subbagian Tata Usaha  
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR  
Wilayah III BPIW Kementerian PUPR

Sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran negara, Kementerian/Lembaga (K/L) memiliki kewajiban untuk mengelola pelaksanaan anggaran dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku. Berperan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN), Kementerian Keuangan berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran, salah satunya dengan mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L. Hal tersebut dilakukan melalui penetapan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

IKPA merupakan indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang terintegrasi pada *Online Monitoring (OM) SPAN* dan menjadi ukuran untuk mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Dalam perkembangannya, penetapan IKPA setiap tahunnya terus mengalami perubahan. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan penilaian yang bersifat dinamis. Pada tahun anggaran 2022, telah dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya

fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran, menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian *output* agar mampu berkontribusi optimal dalam menghasilkan *outcome* perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Jika dilihat dari beberapa tahun terakhir, capaian IKPA K/L menjadi suatu capaian prestasi tersendiri. Penilaian IKPA setiap tahunnya dikompetisikan oleh Kementerian

Kuangan dengan tujuan agar kementerian dan lembaga lebih *aware* dan memperhatikan kinerja pengelolaan keuangan instansinya. Bahkan sampai saat ini penilaian IKPA digunakan sebagai dasar insentif anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2020 atas Kinerja

Mengacu pada hasil capaian IKPA tingkat unit organisasi di Kementerian PUPR, BPIW memperoleh nilai IKPA 92,76 pada periode Desember 2021, atau dengan kata lain berada pada posisi kelima dari 10 unit organisasi. Posisi ini tentunya perlu dioptimalkan agar kinerja anggaran dapat lebih baik lagi.

Mengingat IKPA merupakan hal yang bersifat strategis, karena sebagai tolak ukur kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, maka tulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran tentang peningkatan IKPA, khususnya dari aspek pentingnya peran kepemimpinan sehingga bermanfaat untuk peningkatan IKPA.

Mulai tahun 2018, data IKPA diolah dan ditampilkan secara otomatis oleh sistem aplikasi OM-SPAN. Sejak IKPA menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pengelolaan keuangan yang baik pada K/L maupun Kementerian Keuangan, tingkat *awareness* terhadap IKPA meningkat dan menjadi perhatian utama, sehingga sampai saat ini penilaian IKPA digunakan sebagai dasar insentif anggaran.

Pada tahun 2022, terjadi perubahan paradigma penilaian IKPA yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian *output* agar mampu berkontribusi optimal dalam memberikan dampak terhadap tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pada tahun ini Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 5 PB 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja K/L.

Adapun tujuan reformulasi IKPA terdiri dari tiga hal, yaitu mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian *output* belanja, serta penetapan kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja.



Sumber : website Kementerian Keuangan

### Sejarah dan Reformulasi IKPA

Mengacu pada penjelasan dari website Kementerian Keuangan terkait sejarah penilaian IKPA, IKPA pertama kali digunakan untuk pengukuran dan apresiasi kinerja pelaksanaan Anggaran K/L tahun 2014. Pada saat itu pengolahan data IKPA dilakukan secara manual. Sementara itu, tingkat *awareness* mengenai IKPA juga masih rendah dan belum menjadi perhatian utama K/L.

### Ruang Lingkup IKPA

Peraturan tentang IKPA mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA. Ruang lingkup Perdirjen tersebut mengatur tentang penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA.

Pengukuran IKPA meliputi tiga aspek, aspek pertama yaitu kualitas perencanaan anggaran. Aspek ini merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek kedua yaitu kualitas

pelaksanaan anggaran, aspek ini merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA



Sumber : website Kementerian Keuangan

Sedangkan Aspek terakhir yaitu pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian *output* sebagaimana ditetapkan pada DIPA.

IKPA pada tahun anggaran 2021 memiliki 13 indikator dengan fokus pada 4 aspek yaitu kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan efektifitas pelaksanaan anggaran. IKPA pada TA 2021 telah efektif meningkatkan perhatian K/L terhadap tata kelola pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan semakin membaiknya tingkat kepatuhan K/L terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, dan peningkatan kinerja 13 indikator pada IKPA.

Pada TA 2022 ini, sebagaimana dijelaskan sebelumnya telah dilakukan evaluasi capaian IKPA mengakibatkan dilakukannya perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian *output* agar mampu berkontribusi optimal dalam menciptakan *outcome* perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah indikator kinerja untuk IKPA tahun 2022 dan tata cara penilaiannya:

1. Revisi DIPA (10 %), dihitung dari revisi pagu tetap yang diperhitungkan 14 jenis kode revisi.
2. Deviasi Halaman III DIPA (10%), dihitung dari tiga hal yaitu perhitungan deviasi per jenis belanja, Ambang batas deviasi 5% untuk nilai maksimum, serta batas maksimum deviasi per jenis belanja 100%.
3. Data Kontrak (10%), dihitung dari komponen (1) ketepatan waktu; (2) kontrak dini (pra DIPA efektif); dan (3) akselerasi kontrak 53.
4. Penyelesaian Tagihan (10%), dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS

Kontraktual.

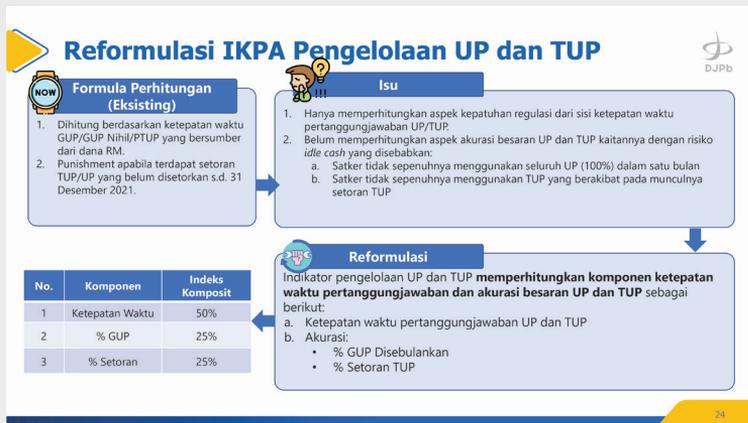
5. Pengelolaan UP dan TUP (10%), dihitung dari komponen: (1) ketepatan waktu; (2) persentase nominal GUP; (3) setoran TUP.
6. Dispensasi SPM (5%), dihitung dari kategori rasio dispensasi SPM yang terbit pada Triwulan IV.
7. Penyerapan Anggaran (20%), dihitung dari rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan per jenis belanja.
8. Capaian *Output* (25%), dihitung dari komponen: (1) ketepatan waktu; dan (2) Capaian RO.

IKPA 2021	IKPA 2022
<b>13 Indikator Kinerja:</b>	<b>8 Indikator Kinerja:</b>
1. Revisi DIPA (5%)	1. Revisi DIPA (10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (5%)	2. Deviasi Halaman III DIPA (10%)
3. Pagu Minus (5%)	3. Data Kontrak (10%)
4. Data Kontrak (10%)	4. Penyelesaian Tagihan (10%)
5. Pengelolaan UP dan TUP (8%)	5. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
6. LPJ Bendahara (5%)	6. Dispensasi SPM (5%)
7. Dispensasi SPM (5%)	7. Penyerapan Anggaran (20%)
8. Penyerapan Anggaran (15%)	8. Capaian Output (25%)
9. Capaian Output (17%)	
10. Penyelesaian Tagihan (10%)	
11. Retur SP2D (5%)	
12. Pengembalian SPM (5%)	
13. Perencanaan Kas (5%)	

Sumber : website Kementerian Keuangan

### Strategi Peningkatan IKPA Per Indikator

Dalam pemenuhan nilai IKPA, Kementerian Keuangan telah memberikan petunjuk yang cukup detail mengenai strategi yang bisa dilakukan oleh setiap satuan kerja agar nilai masing-masing indikator IKPA dapat meningkat. Berikut strategi yang dikutip dari website Kementerian Keuangan yaitu sebagai berikut:



Selanjutnya, yaitu melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. Selain itu, perlu mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

Sumber : website Kementerian Keuangan

**1. Revisi DIPA**, dengan melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran jika diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada Satker.

Selanjutnya, mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I. Langkah terakhir yaitu meminimalkan atau menunda revisi pergeseran antarjenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan trajektori penyerapan anggaran berubah.

**2. Deviasi Halaman III DIPA**, dapat dilakukan dengan secara rutin mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.

Selanjutnya, yaitu menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Jika terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA, serta mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir *cut off* RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA.

**3. Penyerapan anggaran**, dilakukan dengan memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

**4. Belanja Kontraktual**, dengan mengidentifikasi dan mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan.

Kemudian menyiapkan dokumen dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN. Langkah terakhir yaitu memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d. Rp 200 Juta diselesaikan (s.d. pembayarannya kepada pihak ketiga) pada Triwulan I.

**5. Penyelesaian Tagihan**, dengan segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin).

Kemudian selanjutnya yaitu memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara. Lebih teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST atau BAPP.

**6. Pengelolaan UP dan TUP**, dapat dilakukan dengan menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker. Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat *revolving* UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan.

Dalam pengajuan TUP, agar menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran dalam satu bulan secara efektif dan meminimalkan setoran. Selain itu, strategi selanjutnya yaitu menyetero sisa dana UP dan TUP yang berada di Bendahara Pengeluaran/

BPP sebelum akhir tahun anggaran berakhir, serta memonitor status penggunaan UP/TUP pada Aplikasi OMSPAN.

**7. Dispensasi SPM**, strateginya adalah memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana untuk menghindari keterlambatan dalam memproses SPM tagihan pada akhir tahun anggaran. Kemudian menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran.

Langkah terakhir yaitu dengan menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun.

**8. Capaian Output**, strateginya yaitu dengan menetapkan metode perhitungan capaian *output* untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk *output* teknis yang memiliki variasi pengukuran capaian.

Kemudian secara periodik dengan menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian, memperhatikan *gap* progres capaian *output* dengan penyerapan anggaran. Selain itu, melakukan pengisian data capaian *output* bulanan secara komprehensif, akurat, dan disiplin pelaporan sebelum batas akhir *open period reguler* (s.d. 5 hari kerja setelah bulan berakhir).

Selanjutnya, dengan memonitor status data pada Aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah terkonfirmasi. Kemudian, meningkatkan koordinasi antar-PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian *output*.

Keseluruhan strategi diatas idealnya dipahami oleh tim satker yang setiap harinya memiliki tugas yang berkaitan dengan masing-masing indikator tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya kondisi ideal ini tidak bisa serta merta diciptakan tanpa adanya peran Kepala Satker sebagai pemimpin organisasi.

Untuk itu, pada pembahasan selanjutnya akan ditekankan pada pentingnya peran pemimpin dalam peningkatan kinerja anggaran sehingga pada akhirnya IKPA organisasi dapat terpenuhi dengan optimal.

### Kepemimpinan Menjadi Kunci

Berbicara mengenai kepemimpinan, banyak sekali teori yang membahas terkait pentingnya kepemimpinan dalam mencapai kinerja organisasi. Dikutip dari jurnal tentang kepemimpinan, menurut para ahli seperti halnya Handyaningrat, kepemimpinan merupakan kecakapan untuk meyakinkan orang-orang agar mengusahakan secara tegas tujuan-tujuannya dengan penuh semangat. Bawahannya tersebut akan melakukan tugasnya, seorang pemimpin organisasi akan berhasil bila didukung oleh kemampuan mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam mencapai sasarannya.

Pemikiran lain mengatakan bahwa kepemimpinan itu merupakan seni. Sebagaimana menurut pendapat John Pfiffner, mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah seni untuk mengoordinasikan dan memberikan dorongan terhadap individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari kedua pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu seni untuk mengoordinasikan, mengarahkan dan

mengendalikan orang lain untuk bekerjasama mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan dalam suatu organisasi. Jelaslah disini bahwa kepemimpinan berperan sangat penting dalam suatu organisasi.

Pemimpin merupakan seseorang yang menggunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta

**Reformulasi IKPA: Capaian Output**

**Formula Perhitungan (Eksisting)**

1. Nilai Kinerja Capaian Output → dihitung berdasarkan capaian RO dibagi target capaian per triwulan.
2. Nilai IKPA Capaian Output → dihitung berdasarkan rata-rata Nilai Kinerja Capaian Output

**Isu**

1. Perlu percepatan periode pelaporan data capaian output untuk memenuhi kebutuhan pelaporan yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Belum memperhitungkan upaya Satker dalam melaporkan data capaian output secara tepat waktu di periode pertama pelaporan data.
3. *Moral hazard* bagi Satker dalam melaporkan output dengan nilai yang tidak sesuai kondisi riil, dengan tujuan mendapat nilai kinerja yang optimal.

**Formula**

No.	Komponen	Indeks Komposit
1	Ketepatan Waktu	30%
2	Capaian RO	70%

**Reformulasi**

1. Memperhitungkan aspek (1) ketepatan waktu pelaporan, dan (2) ketercapaian output.
2. Penetapan target capaian triwulanan (triwulan I, II, dan III) selaras dengan target penyerapan anggaran.

Catatan: open periode pertama pelaporan data capaian output ditetapkan paling lambat 5 hari kerja setelah bulan berakhir.

Sumber : website Kementerian Keuangan

## Bab IV: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Kategori Nilai	
nilai IKPA > 95	😊 Sangat Baik
89 < nilai IKPA < 95	😐 Baik
79 < nilai IKPA < 89	😞 Cukup
nilai IKPA < 79	😡 Kering

Sumber : website Kementerian Keuangan

bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan organisasinya. Seorang pemimpin memastikan kinerja organisasi dapat tercapai sesuai target. Kinerja organisasi merupakan total dari kinerja yang dihasilkan oleh seluruh pegawai.

Oleh karena itu, kinerja individu dan kinerja organisasi sangat terkait satu sama lain. Pencapaian tujuan organisasi tentunya sangat dipengaruhi sumber daya organisasi, termasuk pegawai yang berperan aktif dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Disinilah peran pemimpin sangat memengaruhi kinerja pegawai yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap produktivitas kinerja organisasi. Organisasi tidak dapat berjalan dengan baik apabila pengelolaan pegawai tidak dikelola dengan baik.

Dalam kaitannya dengan IKPA, Kepala Satuan Kerja (Satker) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemimpin dalam organisasi kesatkeran berperan penting dalam mencapai target kinerja anggaran yang tercermin melalui pencapaian IKPA. Kepala satker sebagai seorang pemimpin idealnya mampu mengelola pegawai dan organisasinya berkinerja dengan optimal.

Seorang Kepala Satker hendaknya memiliki perhatian dan komitmen tinggi dalam pengelolaan anggaran yang akuntabel baik saat perencanaan, pelaksanaan anggaran maupun hasil pelaksanaan anggaran. Apabila dikaitkan dengan peningkatan IKPA, secara umum pemimpin memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

### 1) Fungsi Penggerak Sumber Daya Organisasi

IKPA sebagai cerminan kinerja organisasi sangat membutuhkan peran pemimpin untuk menggerakkan kinerja pegawai yang terkait dengan penggunaan anggaran. Seorang pemimpin dalam hal ini kepala satker idealnya akan menggerakkan pegawai untuk memastikan pemenuhan indikator kinerja yang terdapat di dalam IKPA.

Ketika Kepala Satker *aware* dengan capaian nilai IKPA, maka secara

otomatis akan mengeluarkan kebijakan pengelolaan anggaran yang mempertimbangkan pemenuhan nilai IKPA. Kepala Satker juga akan menggerakkan timnya untuk ikut *aware* terhadap pentingnya pemenuhan indikator IKPA karena indikator ini akan mencerminkan baiknya kinerja keuangan satker.

Selain menggerakkan pegawainya, Kepala Satker juga akan menggerakkan sumber daya yang ada seperti menciptakan sistem kelembagaan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk menciptakan perangkat infrastruktur yang menunjang pelaksanaan pengelolaan anggaran.

Sistem kelembagaan ini dibuat untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan pengendalian secara bertingkat mulai dari Bendahara, Pejabat PSPM, Pejabat Pembuat Komitmen, serta tim satker lainnya, termasuk tim teknis sebagai pengguna anggaran untuk ikut berkontribusi terhadap peningkatan kinerja anggaran satker.

### 2) Fungsi Pengawasan dan Pengendalian

Selain memiliki kewenangan menggerakkan sumber daya organisasi, Kepala satker juga idealnya memiliki kesungguhan dan komitmen untuk selalu mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Dalam melakukan pengawasan, Kepala Satker bisa juga membuka OM-SPAN dan menu Monev Pelaksanaan Anggaran secara rutin serta melihat elemen apa yang

harus dilaksanakan dan diperbaiki. Keuntungan lain yang akan diperoleh dengan selalu membuka OM SPAN kesalahan akan cepat diketahui sedini mungkin, dan sarana bagi Kepala Satker untuk mengontrol pengelolaan keuangan di Satkernya. Dengan demikian diharapkan untuk semester berikutnya IKPA dapat menjadi lebih baik.

Manfaat yang akan diperoleh dengan membuka OM SPAN secara rutin, pimpinan akan mengetahui proses penyelesaian SPM dan realisasi anggaran di Satuan Kerjanya, termasuk dapat memantau IKPA dan apabila terdapat elemen IKPA yang rendah dapat mengkomunikasikan dengan pengelola keuangan Satuan Kerja.

Tentunya monitoring melalui sistem tersebut dapat juga didelegasikan oleh Kepala Satker kepada tim dibawahnya. Disinilah pentingnya mekanisme pengawasan dan monitoring kinerja anggaran yang membutuhkan komitmen dari pimpinan dalam pelaksanaannya. Melalui pengawasan yang rutin, pimpinan dapat melakukan serangkaian langkah pengendalian agar kinerja anggaran sesuai dengan target termasuk indikator yang ada dalam IKPA dapat terpenuhi dengan baik.

Pimpinan yang ideal akan menjalankan fungsi pengawasan sebaik mungkin mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran.

### 3) Fungsi Komunikasi, Konsolidasi dan Kolaborasi

Tim kerja yang solid lahir dari baiknya komunikasi. Kepala Satker sebagai pemimpin yang memiliki kewenangan untuk meningkatkan komunikasi yang efektif mulai saat perencanaan anggaran dibuat sampai pada saat pelaksanaan anggaran. Komunikasi dalam rangka konsolidasi ini sebagai bentuk penyesuaian dan antisipasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dinamis terutama saat pelaksanaan anggaran. Konsolidasi ini dapat dilakukan secara periodik dan sesuai kebutuhan organisasi terutama untuk mengevaluasi capaian IKPA per triwulan.

Kepala satker dengan kewenangannya dapat melakukan konsolidasi dan kolaborasi antar pejabat pengelola perbendaharaan, sehingga ada kesamaan

pandangan dan *awareness* untuk meningkatkan nilai IKPA. Kolaborasi ini diharapkan melahirkan kerja tim yang optimal dan efektif dalam peningkatan kinerja anggaran.

### KESIMPULAN

Mengingat IKPA merupakan hal yang bersifat strategis, karena sebagai tolak ukur kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, maka kepala Satker atau KPA sebagai pemimpin dalam organisasi kesatkeran berperan penting dalam mencapai target kinerja anggaran yang tercermin melalui pencapaian IKPA.

Kepala Satker sebagai seorang pemimpin, idealnya akan mampu mengelola sumber daya organisasinya untuk berkinerja dengan optimal. Seorang Kepala Satker akan memiliki perhatian dan komitmen tinggi dalam pengelolaan anggaran yang akuntabel baik saat perencanaan, pelaksanaan maupun hasil pelaksanaan anggaran. Terkait dengan IKPA, secara umum peran pemimpin memiliki tiga fungsi yaitu fungsi penggerak sumber daya organisasi, fungsi pengawasan dan pengendalian, serta fungsi komunikasi, konsolidasi dan kolaborasi.(\*\*)

### Daftar Pustaka

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Februari 2022. "Reformulasi IKPA 2022", <http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/luwuk/id/data-publikasi/berita-terbaru/2877-reformulasi-ikpa-2022.html>. Diakses pada 27 Maret 2022
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Maret 2022. Reformulasi Dan Strategi Persiapan Penilaian IKPA Tahun 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/artikel/2986-reformulasi-indikator-kinerja-pelaksanaan-anggaran-ikpa-tahun-2022-dan-strategi-persiapan-penilaian-ikpa-tahun-2022.html> Diakses pada 27 Maret 2022
3. Jurnal MODERAT, Volume 6, Nomor 3. 30 Agustus 2020. KARAKTER KEPEMIMPINAN IDEAL DALAM ORGANISASI.
4. Direktorat Jenderal PKTN, Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Sebagai Alat Kontrol Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Kinerja Keuangan Satuan Kerja. 30 Agustus 2021 <https://ditjenpkn.kemendag.go.id/pojok-media/indikator-kinerja-pelaksana-anggaran-ikpa-sebagai-alat-kontrol-dalam-melakukan-pengawasan-pengelolaan-kinerja-keuangan-satuan-kerja>. Diakses pada 27 Maret 2022



# Pesan Pembaca

**Johannes Bhay**

Flores, Nusa Tenggara Timur

**Pengembangan Pariwisata Labuan Bajo NTT**

Usaha Pemerintah melalui Kementerian PUPR dalam mendukung geliat sektor pariwisata pasca Pandemi COVID-19 patut di apresiasi, salah satunya upaya pengembangan destinasi serta sarana dan prasarana pendukung lainnya di Labuan Bajo, NTT.

Dengan peran sentral BPIW Kementerian PUPR sebagai integrator program guna mendukung infrastruktur bagi Kawasan Pariwisata Labuan Bajo menjadi sangat penting. Hal penting selanjutnya adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa konsep premium dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo dan Flores bisa menyuguhkan konten lokal yang otentik kepada wisatawan. Diharapkan dengan telah terbangunnya berbagai sarana dan prasarana infrastruktur dapat sejalan juga dengan penyerapan tenaga kerja, meski merupakan destinasi wisata hampir sebagian besar masyarakat Labuan Bajo tidak bekerja di sektor pariwisata.

**Danil Arolibi**

Jawa Timur

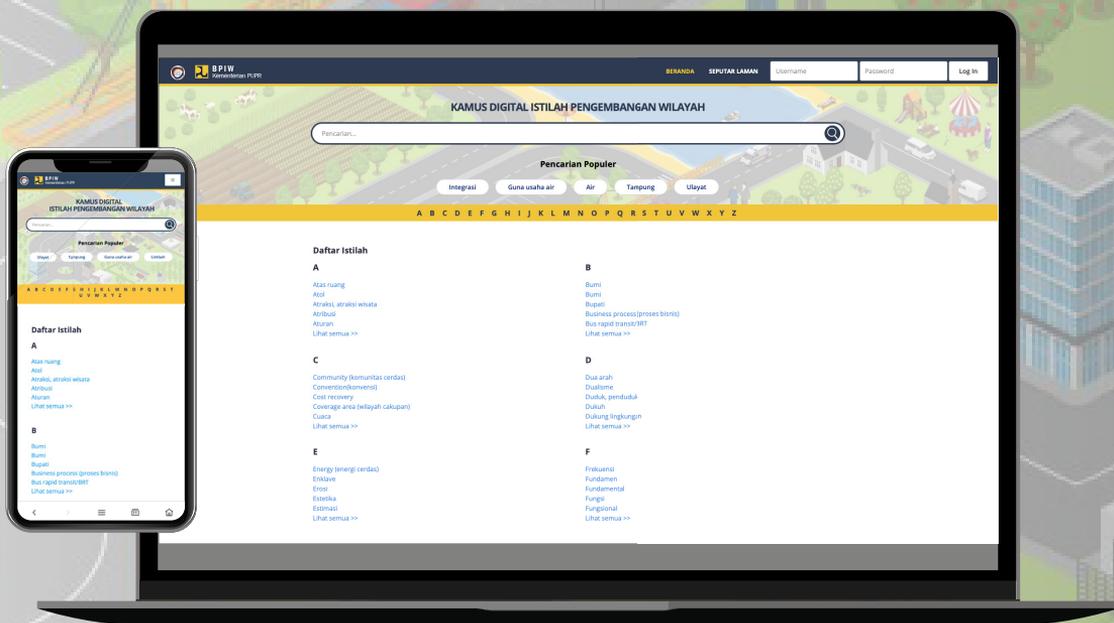
**Pemerintah Harus Cermat Membuat Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan Infrastruktur Indonesia tengah menghadapi tantangan seiring dengan perkembangan pandemi Covid-19. Indonesia akan membutuhkan banyak sekali pengeluaran untuk menjalankan paket-paket stimulus dan pengeluaran untuk menghilangkan pandemi. Hal tersebut juga akan berdampak pada proses pembiayaan proyek proyek di Indonesia. Namun Indonesia juga harus melihat hal tersebut sebagai bagian dari pemulihan ekonomi karena proyek tersebut akan membuka lapangan kerja baru, pengembangan ekonomi daerah, serta menurunkan biaya logistik.

Mengingat terbatasnya biaya dan pentingnya pembangunan, pemerintah harus cermat dalam membuat skala prioritas proyek pembangunan infrastruktur. Kita tentu sangat mengapresiasi langkah pemerintah untuk membangun berbagai macam infrastruktur di Indonesia. Tetapi jangan sampai pembangunan tersebut justru menimbulkan kerugian akibat hutang konstruksi yang tidak setara dengan penghasilan serta tidak ada outcome yang berarti bagi penggunaannya. Masifnya pembangunan di Indonesia kita harapkan dapat terus memberikan manfaat diberbagai sektor perekonomian dan berkontribusi positif untuk rakyat Indonesia.

Bagi sahabat Sinergi yang ingin menyampaikan saran dan masukan dapat di kirim ke email [hkkompu.bpiw@pu.go.id](mailto:hkkompu.bpiw@pu.go.id) atau Whatsapp **0838-0874-7276**

# KAMUS DIGITAL ISTILAH PENGEMBANGAN WILAYAH



Selengkapnya  
Cek QR!

